

**EFEKTIVITAS PERAN KEPEMIMPINAN KIAI
SEBAGAI PIMPINAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Program Studi Siyasah Jinayah (SJ)

Oleh:

MUHAMAD IMRON
NIM : 2 1 0 3 2 4 0

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Raya Boja KM. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi

Atas nama : Muhamad Imron

No. Induk : 2103240

dengan judul : Efektivitas Peran Kepemimpinan Kiai Sebagai Pimpinan Partai
Politik di Kabupaten Batang Jawa Tengah

telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, pada tanggal :

27 Januari 2009

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah Program Studi Siyasah Jinayah (SJ).

Semarang, 10 Februari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

A. Arief Budiman, M. Ag

NIP. 150 274 615

Drs. H. Nur Syamsudin M. Ag

NIP. 150 274 614

Penguji I

Penguji II

Dr. Imam Yahya, M. Ag

NIP. 150 275 331

Nur Fathoni, M. Ag

NIP. 150 299 490

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag

NIP. 150 216 494

Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag

NIP. 150 274 614



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Raya Boja KM. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi

Atas Nama : **Muhamad Imron**

Jurusan : Siyasah Jinayah

dengan judul : **Efektivitas Peran Kepemimpinan Kiai Sebagai**

Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Batang Jawa Tengah

telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, pada tanggal :

27 Januari 2009

Dan telah diterima serta disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah Program Studi Siyasah Jinayah (SJ).

Semarang, 10 Februari 2009

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H Abdul Fatah Idris, M. Ag

NIP. 150 216 494

Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag.

NIP. 150 274 614

MOTTO

“Hidup adalah Sebuah Kenyataan, Lawan!!!

-Muhamad Imron.-

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk Tuhan, Orang tua
dan dalam Diriku Sendiri

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Februari 2009

Deklarator,

Muhamad Imron

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari rasa penasaran peneliti menyaksikan fenomena keterlibatan kiai dalam politik praktis. Keterlibatannya ternyata tidak hanya sebatas sebagai pemanis partai saja, tetapi banyak yang menempati posisi strategis partai, yaitu sebagai pimpinan partai. Realitas sosial inilah yang kemudian menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti lebih jauh bagaimana keterlibatan kiai dalam politik praktis, terutama sebagai pimpinan partai di daerah asal peneliti, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada dua partai yang di dalamnya banyak di singgahi oleh para kiai, dan representative untuk dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu Partai Persatuan Pembangaun (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karena itu penelitian ini akan dikonsentrasikan pada efektivitas peran kepemimpinan kiai di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dan PKB Kabupaten Batang.

Setidaknya ada tiga permasalahan dalam kaitannya dengan penelitian ini, antara lain adalah: Apa latar belakang keterlibatan kiai dalam politik praktis? Bagaimana peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang? Dan sejauhmana efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik, dan implikasinya ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sudut pandang (*stand point*) penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu satu model penelitian humanistik, yang menunjukkan tentang kehidupan masyarakat sosial, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan tingkah laku. Sifat humanis dari aliran pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial.

Karena penelitian ini merupakan jenis *field research*, maka data-data sepenuhnya diperoleh dari lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Batang. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari: Kiai atau tokoh masyarakat; Pengurus partai; dan Simpatisan partai/konstituen.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang peneliti gunakan adalah teknik *purposif sampling*, yaitu informasi sampel yang peneliti dapat dari salah satu pihak. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi dan antropologi, maka teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik *deskriptif-analitik* yakni memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.

Dalam penelitian ini bahan-bahan penulisan semaksimal mungkin mengacu pada sumber-sumber primer, kemudian diklasifikasikan menurut bidang-bidangnya. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber sekunder berupa kepustakaan yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

Melalui analisis itu terungkap bahwa ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang keterlibatan kiai dalam politik praktis, yaitu karena alasan berazaskan Islam, adanya sinergisitas perjuangan antara Islam dan NU, karena panggilan jiwa dan bentuk pengejawantahan konsep *din wa dulah*. Alasan yang lain adalah sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam kaitannya dengan peran kiai sebagai pimpinan partai politik, peneliti membagi dalam tiga ranah, yaitu ranah partai politik, ranah pemerintahan dan ranah masyarakat. Bagaimana efektivitas peran kepemimpinan kiai, peneliti mencoba mengambil benang merah. Dalam aras partai politik, secara politis keberadaannya sangat efektif bagi kebesaran partai, terutama dalam pendulangan suara (*foat getter*). Namun dalam persoalan manajemen partai, keberadaan kiai tidak begitu efektif karena kurang matangnya manajemen organisasi. Maka agar kepemimpinan kiai lebih efektif, harus ada *second line* dan pola koordinasi yang aktif antara pimpinan dengan jajaran di bawahnya.

Dalam aras pemerintahan, kiai lebih banyak sebagai pemantau kebijakan. keberadaannya juga cukup efektif dalam pembejalaran politik masyarakat (*civil education*) -meskipun tidak dalam kapasitas formal- dan usaha preventif terhadap kemungkinan munculnya gejala-gejala yang berupa ketimpangan sosial. Namun demikian, keberadaan kiai tidak begitu efektif dalam pembuatan kebijakan publik, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik akan berjalan efektif jika *dibarengi* dengan beberapa syarat, yaitu syarat intelektual, manajerial dan moral.[/]

KATA PENGANTAR

“Rasa penasaran dan penuh tanya”. Begitulah kata awal mengapa penelitian ini dilakukan. Meskipun bukan barang baru lagi kita, keterlibatan kiai dalam politik ternyata cukup menyisakan waktu untuk tidak bisa diam, mengamati, bahkan harus meneliti lebih dalam. “Kenapa akhir-akhir ini banyak kiai dan gus yang *rame-rame* berjamaah menuju gerbang politik?”. Tidak hanya itu, perselingkuhannya juga mendapat respon yang sangat besar oleh para elit partai, terutama partai yang mempunyai basis massa Islam. Respon positif tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya kiai dan gus yang duduk dalam posisi strategis partai, sebagai pimpinan partai misalnya. Fenomena ini dapat kita saksikan di beberapa daerah di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Batang Jawa Tengah. Ada dua partai yang ‘hampir’ setiap periode kepemimpinan di tempati oleh kiai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Telusur punya telusur, ternyata ada dua faktor yang cukup mendasar mengapa para elit agama ini banyak diposisikan dalam teras partai tersebut, yaitu faktor sejarah dan politis. Satu pertanyaan besar sejauhmana efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik? Sederhana, peneliti ingin menguak asumsi-asumsi dasar tersebut dalam penelitian yang cukup mendalam. Terutama di daerah peneliti dibesarkan, Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sesungguhnya penelitian ini sudah direncanakan cukup lama. Namun bukan berarti penelitian ini dilakukan serius selama itu. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang cukup sempit, di sela-sela kesibukan peneliti “mengabdikan diri” menjadi *cleaning servis* di rumah Tuhan, terlebih ditambah dengan mekanisme kampus yang cukup membuat peneliti pusing. Setidaknya hanya tersedia tiga bulan efektif ketika peneliti fokus dan “mencoba” menyempitkan ruang kesibukan itu.

Bukan bermaksud apologis, bagi peneliti kegelisahan tidak semata-mata di ruang kuliah dan bersama tumpukan kertas. Realitas sosial jauh lebih menggelisahkan, hingga kemudian cukup menyita waktu dan pikiran peneliti. Pada saat yang sama, peneliti berpendirian bahwa skripsi bukan semata-mata syarat

administratif untuk mendapatkan gelar yang begitu “material”. Skripsi mestinya merupakan jawaban calon sarjana atas suatu persoalan. Skripsi harus menjadi tawaran ilmiah dan konseptual mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Apapun persoalan itu. Oleh karena itu, mengorientasikan skripsi hanya untuk kepentingan kelulusan adalah sebuah “penghianatan intelektual”.

Berlama-lama tinggal di kampus dan melakukan penelitian bukan hal yang buruk. Ia dipandang lebih baik daripada para pengejar IP (indeks prestasi) dan gelar untuk kepentingan yang sangat personal dan pragmatis.

Sebenarnya peneliti berharap penelitian ini bisa dilakukan secara maksimal dengan waktu yang cukup lama. Namun karena keterdesakan waktu dan persoalan yang ‘naif’ jika disebutkan di sini. Akhirnya peneliti mengalah untuk mengesampingkan perfeksionisme. Berbagai kekurangan dan kelemahan ilmiah peneliti sadari ada di banyak bagian dalam penelitian ini. Karena itulah, peneliti berharap siapapun yang membaca hasil penelitian ini berkenan untuk membimbing, memberikan kritik, saran dan pembinaan yang dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian.

Momentum itu tampaknya semakin menambah urgensi penelitian ini untuk dilakukan. Dan karena itu pula, peneliti menjadi semakin serius melakukannya, meski masih jauh dari sempurna. Sebab bagi peneliti, penelitian ini adalah media belajar. Oleh karenanya, dukungan dan pembelajaran dari berbagai pihak sangat peneliti rasakan. Penelitian ini berhasil diselesaikan bukan semata-mata keringat peneliti. Kontribusi berbagai pihak, lembaga/instansi dan berbagai komunitas sangat besar dan bahkan menentukan keberhasilan penelitian ini. Untuk itulah, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor.

Habib Umar Muthahar, SH adalah sosok yang tidak pernah *alpa* dalam hidup peneliti dan penelitian ini. Beliau adalah orang yang tak henti-hentinya meniupkan api perjuangan dalam diri peneliti. Beliau adalah salah satu habaib yang tak mengenal sekat dengan siapapun, dan karenanya peneliti dapat berbagi tentang tema penelitian ini. Hidup bersama beliau juga peneliti belajar tentang kearifan,

memberikan semangat dalam keputusasaan. “Seribu langkah diawali dari satu langkah” kata itulah yang selalu menjadi motivasi peneliti dalam setiap langkah.

Tak ketinggalan, bapak Nasrudin Azis. Sosok guru, bapak, teman yang tak henti-hentinya selalu menanyakan proses kuliah peneliti. Bersama beliau peneliti banyak ngangsu kaweruh.

Sanjungan terima kasih juga peneliti haturkan kepada kang Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. Intelektual muda begitu ia populer di kalangan aktivis. Dialah yang tidak henti-hentinya berkenan berdiskusi dan memberikan banyak kontribusi dalam proses penelitian ini. Di tengah-tengah kesibukannya berpetualang dan *lalu-lalang* Jakarta-Batang untuk melaksanakan tugas peradabannya, sesekali ia menyempatkan berbincang dengan peneliti.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Tengah, sebuah organisasi di mana peneliti pernah hidup dan dibesarkan. Peneliti banyak belajar dan ditempa bersama rekan-rekan senior di sana. Terutama rekan-rekan senior PW IPNU Jawa Tengah (masa khidmat 2004-2006) dan komunitas Dr. Cipto pada umumnya.

Komunitas lain yang sangat penting dalam penelitian ini adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) NU Batang. “Komunitas nakal” anak-anak muda NU ini banyak memberikan andil, memberikan wacana, dan lain sebagainya. Terima kasih atas semuanya.

Kekuatan masyarakat sipil lain di daerah yang turut mendewasakan peneliti adalah Konsorsium Demokrasi Rakyat untuk Perubahan (DERAP), *Consortium for Community Development*. Anggota konsorsium ini terdiri atas Yayasan ALUR, Fatayat NU, GP. Ansor, IPNU, IPPNU, LAKPESDAM NU, JAKERTANI Qoryah Thoyyibah, LSM JERAM, PAB, FKMBI, KMBS dan Forum Warga Batang.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan aktivis konsorsium tersebut: kang Caswy (Presiden Derap), Mas Ihwan (GP. Ansor) terima kasih pinjaman bukunya mas. Tak ketinggalan rekan Ali Murtadlo, Anas, Yasin, Ghazi, Hamam (IPNU), Ilux, Ria, Vies, Eni dan Ana (IPPNU), Kang Amin

(JERAM), Kang Umar dan Ulfan (LAKPESDAM), Kang Turjaun (Jakertani), Kang Arif Rahman (Forum Warga), Doni, Dwi (FKMBI), dan Hani, Tabiin (KMBS). Demikian juga peneliti berterima kasih kepada “penunggu” Konsorsium DERAP: Fajar, Singo, Warleh, Jemek, Ulil dan lain-lain.

Tak ketinggalan, teman-teman Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang (KMBS) yang selalu ‘nyindir’ kelulusan peneliti. *‘wis tuwo rak bar-bar kuliahe, kapan luluse kang?’*. Sindiran-sindiran itulah yang ternyata menjadi dukungan moril dan faktor penting untuk sesegera mungkin menjadi *mutakhorij* dari kampus Ngaliyan. Adik-adik, jangan patah semangat untuk membesarkan Batang.

Di kampus, peneliti juga sempat aktif di LPM Justisia, meski tidak total, tapi peneliti yakin dari sanalah semangat untuk terus menulis berawal. Peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan moril dari kawan-kawan yang sedang berproses di IAIN Walisongo. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Komunitas Mahdani Indonesia, Fahsin M. Fa’al, S.Hum., Iman Fadhilah, SHI, Dzul Fahmi Marjohan, SPd., dll. Merekalah senior dan juga kakak yang selalu memotivasi dengan ‘nada-nada sindiran’.

Dalam kesempatan ini peneliti juga mengucapkan terima kasih atas motivasi dari rekan-rekan PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Bawang, mbah Edi, Jompong, my syster (erni) ida, rina Komet(dullah) dan lain-lain yang tidak sempat peneliti sebutkan di sini.

Secara khusus, peneliti berterima kasih kepada segenap jajaran kepengurusan DPC PPP dan PKB Kabupaten Batang yang telah berkenan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Terutama, K. Muhtadi, Mas Rohman, Mas Munir, dan segenap pengurus teras DPC PKB. Juga DPC PPP, Mbah Nur, K. Soleh, Mas Yono, Mas Muhson dan yang tidak sempat peneliti sebutkan di sini. Terima kasih atas bantuan terlaksananya proses penelitian. Berjuanglah untuk kepentingan rakyat!

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ta’mir Masjid Baiturrahmah dan seluruh masyarakat Kalibanteng Kulon Semarang yang telah menerima peneliti dengan baik. Terkhusus untuk bapak Sutopo atas bantuan njenengan selama ini, *barokallah*. Berat rasanya ketika harus meninggalkan

kampung yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama peneliti berbaur dengan *njenengan* semua. Tak ketinggalan teman-teman sekamar di Masjid, Miftah, Intan, Tidar, Niar, Agil, Akid, Mandon. Secara khusus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada romo Alvian atas segala bantuannya.

Tidak ketinggalan, rekan-rekan dewan asatidz TPQ Baiturrahmah Kalibanteng Kulon Semarang. Juga kepada adik-adikku santri TPQ, terima kasih atas doa kalian, semoga menjadi anak yang soleh-solekah kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. H. Fatah Idris, M. Ag dan Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag. Di bawah bimbingan beliau-beliau penelitian ini dapat diselesaikan. Proses penyelesaian penelitian ini juga tidak lepas dari peran para pejabat Jurusan Jinayah Siyasah, ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kajur SJ Drs. Arif Junaidi M.Ag, Rupi'I, M. Ag dan mbak Neli.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada seluruh civitas akademika IAIN Walisongo Semarang. Terutama Bapak dan Ibu Dosen, karyawan, serta mahasiswa yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berharga kepada peneliti. Mohon maaf atas segala kesalahan kami.

Di atas semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan yang pertama kali mengenalkan peneliti kepada dunia ini. Jasa-jasanya tak terhitung dan tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada adik-adik, Nanik, Erni, Evi, Aries dan seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, dorongan dan fasilitas untuk penelitian ini.

Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada adinda 'Siti Rif'ati' yang selalu setia menemani, memberikan doa dan motivasi untuk selalu tegar dalam setiap persoalan. Terima kasih dik ya.

Terakhir, terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para guru dan para senior serta teman-teman dari berbagai kalangan yang tak pernah kenal lelah mengobarkan api dalam diri peneliti. Penelitian ini menjadi mungkin dilakukan karena kontribusi dan dukungan semua pihak.

Jazakumullah akhsanal jazaa wa jazaauun katsiiroo.

Semarang, 05 Januari 2009

Peneliti,

Muhamad Imron

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BABI : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II : POLITIK KIAI DAN DIMENSI KEPEMIMPINAN	
KIAI DALAM ISLAM	19
A. Pengertian Kepemimpinan dan Politik.....	19
1. Pengertian Kepemimpinan.....	19
2. Pengertian Politik.....	23
B. Pengertian Kiai dan Tipologinya	26
1. Pengertian Kiai	26
2. Tipologi Kiai.....	29
C. Dimensi Kepemimpinan dalam Islam	30
1. Teori-Teori dan Tipe Kepemimpinan.....	31
2. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam.....	33
D. Kepemimpinan Kiai dan Politik Praktis	37

BAB III:	LATAR BELAKANG DAN PERAN KEPEMIMPINAN KIAI DALAM POLITIK DI KABUPATEN BATANG.....	41
	A Kondisi Geografis dan Sosio-Politis.....	41
	1. Kondisi Geografis	41
	2. Kondisi Sosio-Politis.....	43
	B Latar Belakang Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis	46
	1. Motivasi dan Orientasi Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis.....	46
	2. Kiai Sebagai Pimpinan Partai Politik	51
	C Peran Kiai Sebagai Pimpinan Partai Politik.....	58
	1. Peran Kiai dalam Partai Politik.....	59
	2. Peran Kiai dalam Pemerintahan	64
	D Implikasi Keterlibatan Kiai dalam Politik.....	68
BAB IV	EFEKTIVITAS PERAN KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK DAN IMPLIKASINYA.....	72
	A. Pola Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis	74
	1. Latar Belakang Keterlibatan Kiai dalam Politik.....	74
	2. Kiai Sebagai Pimpinan Partai Politik.....	78
	3. Pola Keterlibatan dan Tipologi Kiai dalam Politik.....	82
	B. Efektivitas Peran Politik Kiai dan Implikasinya	85
	1. Efektivitas Peran Politik Kiai.....	85
	2. Implikasi Keterlibatan Kiai dalam Politik.....	87
BAB V	PENUTUP.....	90
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran-saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian politik tiada lain adalah kajian mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan batasan serta teknik penggunaan kekuatan sosial. Dan agama adalah salah satu sumber kekuatan sosial, yang secara tak terelakkan berinterelasi dengan politik. Kekuasaan yang berpijak pada interelasi agama dan politik itulah yang disebut *religio-politik power* yang bisa ditelusuri melalui beberapa fokus.¹

Berdirinya negara Indonesia menjadi varian (sistem politik) ketiga yang menata secara “kompromis” pola hubungan antara negara dan agama. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membentuk diri sebagai “Negara Pancasila,” yang memiliki tafsiran bahwa negara tidak identik dengan agama tertentu (Islam), tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara.

Meminjam pendapat Afan Gaffar, agama harus dilihat dari dua dimensi. Pertama, agama sebagai sebuah keyakinan yang dianut oleh sekelompok orang, baik secara individual maupun kelompok. Kedua, agama sebagai sebuah fenomena sosial. Sehingga keberadaannya *acapkali* dijadikan

¹ Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi : Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*, Jogjakarta : Pustaka Marwa, Cet. ke-1, 2004, hlm. 49-50.

sebagai alat untuk bertahan, dijadikan pegangan, atau ikatan solidaritas baru, menggantikan solidaritas yang lain, bahkan sebagai komoditas politik.²

Dalam bahasa agama, politik adalah 'ikhtiar'. Ikhtiar untuk menemukan cara hidup yang total dengan menawarkan landasan moral dan etis bagi pemecahan semua masalah kehidupan. Sehingga keberadaan Islam adalah sebagai *din* (agama), *dunya* (dunia), dan *daulah* (negara politik) yang terejawantahkan dalam konsep negara Islam yang mempunyai tujuan untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).³

Dalam sejarah Islam, penegakan konsep politik di atas tercermin dalam kepemimpinan Rasulullah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menjelang wafat (8 Juni 632 M), kaum muslimin segera merasakan kekosongan kepemimpinan dan melihat di hadapan mereka berbagai masalah dan tanggung jawab yang besar. Hal ini dikarenakan Rasulullah tidak memberikan aturan yang baku soal-soal kenegaraan, termasuk di dalamnya adalah masalah kepemimpinan.⁴ Maka, sejak saat itu mulailah bermunculan beragam pendapat dan kecenderungan dalam melihat masalah

² Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-5, 2005, hlm. 123-124

³ Abdelwahab El-Affendi, *Who Need and Islamic State*, Terj. Amirudin ar-Rani, "Masyarakat Tak Bernegara : Ktitik Teori Politik Islam", Jogjakarta : LKiS, Cet. ke-1, 1994, hlm. 50-51

⁴ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, Terj. Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam, "Pergolakan Pemikiran Politik Islam", Jakarta : Beunabi Cipta, Cet. Ke-1, 1987, hlm. 37.

kepemimpinan. Puncaknya adalah pada pertemuan Saqifah Bani Saidah yang memperdebatkan tentang *khilafah* atau *imamah* (kepemimpinan negara).⁵

Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah persepsi dari Abu Bakar akan perannya sebagai penerus Nabi. Pandangan ini dengan sepenuh hati didukung oleh masyarakat yang menemukan ketentraman lanjutan dari zaman Nabi.⁶ Atas prakarsa Umar bin Khotob, terpilihlah Abu Bakar As-Shidiq r.a untuk menduduki jabatan khalifah menggantikan kedudukan Nabi.⁷ Pergantian kepemimpinan (khalifah) ini kemudian berlanjut hingga masa kekhalifahan Umar dan Ali serta Usman yang kita kenal dengan istilah *Khulafat ar-Rosyidin*.

Periode kekhalifahan selanjutnya adalah periode kepemimpinan dinasti Umayyah, Abasiyyah hingga berakhirnya dinasti Ottoman dengan munculnya Republik Turki (1924) yang dimotori oleh tokoh gerakan nasionalisme Turki, Mustafa Kemal at-Taturk.⁸ Pasca-pembubaran Kesultanan Turki ‘Utsmani, pemerintah kolonial yang sudah memantapkan posisinya pada awal abad ke-20, memungkinkan cara-cara pemerintahan khalifah menjadi *eksplisit* dalam imajinasi kalangan umat Islam, setelah sebelumnya terpendam dan tidak jelas arahnya.⁹

⁵ Muhammad Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul Sialmiyah*, Terj. Abdul Hayyi Al Kattani (*et al*),” Teori Politik Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, hlm. 10.

⁶ Abdelwahab El-Affendi, *Op. Cit*, hlm. 25

⁷ Abul A’la al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Terj. Muhammad Al-Baqir, “Khilafah dan Kerajaan : Telaah Kritis Atas Sejarah Peradaban Islam”, Bandung : Mizan, Cet. Ke-1, 1984. hlm. 112.

⁸ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Jakarta : Logos, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 142

⁹ Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung : Mizan, Cet. Ke-1, 2005, hlm. 103

Meskipun, sistem kekhalifahan Islam telah berakhir, namun diskursus politik Islam masih menjadi topik yang cukup hangat untuk diperbincangan. Terlebih di tengah menjamurnya gerakan pembaharuan dan gerakan politik Islam, termasuk di Indonesia.

Sejarah Indonesia mencatat, pemilu 1955 merupakan babak baru dalam proses demokratisasi di Indonesia, dengan 28 partai politik dengan corak dan ideologi yang berbeda, nasionalis, religius dan komunis.¹⁰ Namun demikian, arus demokrasi itu tidak mampu bertahan lama, cukup sampai berakhirnya Orde Lama dengan jatuhnya Soekarno yang kemudian menjadi pancang sejarah pergeseran fase perpolitikan Indonesia memasuki era Demokrasi Pancasila, dengan Orde Baru (Orba) di bawah kekuasaan Soeharto.¹¹

Format politik Orba memperlihatkan kenyataan yang menarik, yaitu terjadinya proses *de-aliranisasi* yang dilakukan dengan berbagai macam cara. *Pertama*, dengan melakukan depolitisasi massa secara sistemik. *Kedua*, dengan melakukan *floating mass* atau massa mengambang. Artinya, individu-individu tersebut tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai politik, kecuali pada saat Pemilu.¹² Pada masa ini, ruang demokrasi menjadi tertutup, kebebasan pers terbungkam dan segala aktivitas politik dibatasi,

¹⁰ Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 66.

¹¹ A. Muhaimin Iskandar, *Menumbuhkan Kader Bangsa Investasi Politik Bersama Rakyat*, Jakarta : DPP PKB, 2000, hlm. 6

¹² Afan Gaffar, *Op. Cit*, hlm. 131-132

termasuk jumlah partai, sehingga hanya ada tiga partai politik, Golkar (karakteristik kekaryaan), PDI (nasionalis) dan PPP (keislaman).

Pemerintah Orba memelihara koalisi yang sangat harmonis dengan kelompok *abangan*, kecuali kalangan Soekarnoïs dan kalangan Kristen/Katolik. Sementara itu, wajah Islam juga menjadi *babak belur* diklaim sebagai kelompok '*ekstrem kanan*' dengan isu strategis pembentukan negara Islam dan menggantikan Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Yang mengemuka adalah 'ancaman Islam sebagai kebijakan dan objek pengawasan' yang kemudian direproduksi oleh Orba dengan jargon 'bahaya laten ekstrem kanan'.¹³ Kekuatan rezim Orba ini akhirnya harus tumbang dengan ditandai *euphoria* reformasi dan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, yang kemudian mampu membawa angin segar terhadap berbagai aspek kehidupan -termasuk politik- meskipun dalam perkembangan selanjutnya masih tersendat-sendat.¹⁴

Terbukanya kran politik tersebut kemudian menjadi rahim bagi lahirnya partai-partai politik dengan berbagai corak dan ideologi. Termasuk di dalamnya adalah partai-partai berazaskan Islam. Dalam tataran kenyataan di Indonesia (pasca reformasi) berdiri berbagai partai politik dengan latar belakang Islam. Diantaranya adalah PPP, PKB, PAN, PBB, PBR, PKS, PNU, PKNU dan lain sebagainya yang didirikan oleh para kiai/ulama. Berdirinya partai-partai Islam ini kemudian membawa momentum baru bagi

¹³ Ahmad Baso, *Op. Cit.* hlm. 202

¹⁴ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta : Medpress, Cet. Ke-2 2008, hlm. 54

sejumlah elit agama dan aktivis muslim untuk berbondong-bondong terjun dalam politik praktis, termasuk ‘kiai’ dan ‘gus’.

Diskursus tentang politik kiai, nampaknya sulit untuk lari dari keterkaitan antara kiai pesantren, organisasi Nahdlatul Ulama’ (NU), dan politik praktis.¹⁵ Dalam perjalanan sejarah tampak sekali keikutsertaan NU dalam kancah politik formal, sejak didirikannya tahun 1926, NU tampil ke permukaan sebagai organisasi sosial keagamaan, bahkan dalam pemilu pertama tahun 1955, NU muncul sebagai empat besar partai politik ketika itu.¹⁶ Kekuatan kharismatik kiai dalam organisasi ini sangat besar, sehingga menjadi ketaatan yang sulit ditolak (*sami’na wa atho’na*).

Dalam perspektif sejarah di Indonesia, peran para kiai tidak bisa dinafikan secara cuma-cuma. Ini bisa ditelusuri melalui catatan-catatan arsip sejarah bahwa para kiai ikut berperan aktif dalam mengusir dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (RI) dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang muncul dari dalam (*laten*) maupun luar negeri. Dengan berbagai cara dan atribut serta simbol-simbol khas ala Islam, mereka juga turut berkecimpung dalam menata, mengolah dan memantapkan visi dan misi kedaulatan Republik Indonesia.¹⁷

Tetapi, dewasa ini para kiai, khususnya kiai pesantren, dihadapkan pada keadaan yang sulit dalam mewujudkan rasa cintanya terhadap bangsa

¹⁵ Slamet Effendi Yusuf, M. Ichwan Syam, dan Masdar Farid Mas’udi, *Dinamika Kaum Santri*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 18

¹⁶ Inu Kencana Syafi’ie dan Azhari, SSTP, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 80

¹⁷ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1. 2007, hlm. 152-153

(*hubbul wathan*). Dulu, hampir semua kiai digolongkan sebagai kiai kultural dan basis kekuatan moral. Namun, fenomena mutakhir memperlihatkan para elit agama ini secara 'berjamaah' meluncur ke panggung politik.¹⁸ Persinggungan kiai dalam politik nampaknya hampir menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat desa hingga pusat. Oleh sejumlah elit, kiai banyak ditempatkan dalam posisi strategis, sebagai pimpinan partai misalnya.

Mengapa keberadaan kiai begitu diperhitungkan dalam politik? Menurut tesis Azyumardy Azra, dalam masyarakat pedesaan Jawa, ada tiga figur yang dihormati yang di luar lingkaran kerabat, yaitu kepala desa berikut perangkatnya, guru dan kiai.¹⁹ Guru dan kiai sebenarnya figur yang sama dengan *lurah*, meski dalam wilayah kultural yang berbeda. Guru dan kiai intan dalam dunia pendidikan, tindakan dan perbuatannya begitu santun, sehingga setiap orang akan menaruh rasa *hormat*.²⁰

Barangkali akan terlintas juga dalam benak kita, apakah keberadaan kiai dalam politik hanya sekedar untuk menutupi *imej* 'politik itu kotor', untuk meraih simpati rakyat, atau karena *bargaining position*, seperti intelektualitas, moralitas, kharismatik, popularitas dan reputasinya.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Tulisan ini dapat dilihat dalam pengantar buku karangan Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi : Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*, Jogjakarta : Pustaka Marwa, Cet. ke-1, 2004, hlm. xiv

²⁰ *Ibid*. hlm. xv

Maka berpijak dari fenomena sosial di atas, kemudian menjadi titik berangkat penelitian terhadap “Efektivitas Peran Kepemimpinan Kiai Sebagai Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Batang Jawa Tengah”.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada dua partai, yaitu DPC PPP dan PKB. Karena menurut peneliti, dua partai inilah yang di dalamnya banyak di singgahi dan sekaligus dipimpin oleh para kiai. Dalam struktur DPC PPP misalnya, K.H. Ahmad Nur Khozin (Ketua MPC DPC PPP), K.H. Ahmad Sholeh Ma’sum (Ketua Tanfidz DPC PPP periode 2006-2011).²¹ Sedangkan di DPC PKB, K. Muhtadi (Ketua Dewan Syuro DPC PKB) dan Fathurrahman (Ketua Tanfidziyah DPC PKB periode 2007-2012).²²

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari *social-fenomenology* di atas, maka dalam kaitannya dengan penelitian ini, setidaknya ada tiga permasalahan yang akan dibahas.

1. Apa latar belakang keterlibatan kiai dalam politik praktis?
2. Bagaimana peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang?
3. Sejauhmana efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik, dan implikasinya ?

²¹ Informasi diperoleh dari susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Batang Periode 2006-2011

²² Caswiyono Rusydi Cw. (ed), *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB*, Batang : DPC PKB, 2007, hlm. 72

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang keterlibatan kiai dalam politik praktis.
2. Untuk memahami sejauhmana persinggungan kiai dan peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang.
3. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik, dan implikasinya terhadap aspek sosial dan politik.

Pencapaian tujuan di atas menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan penelitian ini. Sementara itu secara praktis, kajian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meraba format dan pendekatan politik yang ideal, dengan hadirnya pemimpin yang amanah, adil, demokratis dan *uswah hasanah* bagi semua.

Di sinilah penelitian ini juga menemukan urgensinya dengan memberikan sedikit ‘tawaran’, meskipun tidak mungkin dalam formulasi kongkret. Apapun hasilnya, peneliti berharap *torehan* tinta ini akan bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak yang berkenan.

D. Telaah Pustaka

Banyak kajian dan penelitian tentang politik kiai. Namun demikian, diskursus persinggungan kiai dengan politik menurut peneliti merupakan kajian yang masih membutuhkan pendalaman. Oleh karena itu, kajian penelitian ini secara spesifik akan dikonsentrasikan pada “efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang”.

Sepanjang penelitian, beberapa kerangka teoritik yang berkaitan bersumber pada beberapa buku dan hasil penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Buku Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, yang mengulas tentang keterlibatan kiai dalam partai politik.²³ Kemudian Buku Achmad Patoni, *Peran kiai pesantren dalam politik praktis*. Diskursus buku ini cukup sinergis dengan tesis Endang Turmudi.²⁴

Buku Sabastian Salang, *Potret-Potret Partai Politik di Indonesia : Asasemen Terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Forum Politisi, 2007.²⁵ Kemudian buku “*Agama Priyayi : Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*”, karya Zainuddin Maliki .²⁶

²³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 29

²⁴ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Paratao Politik*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-1. 2007

²⁵ Buku ini mebidik tentang potret partai politik di Indonesia, lebih lanjut lihat dalam Sabastian Salang, *Potret-Potret Partai Politik di Indonesia : Asasemen Terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Forum Politisi, 2007

²⁶ Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi : Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*, Jogjakarta : Pustaka Marwa, Cet. Ke-1, 2004

Buku lainnya adalah karya Zuly Qodir '*Islam Syari'ah Vis A Vis Negara : Teologi Gerakan Politik di Indonesia*'. Buku ini mengetengahkan relasi antara agama dan negara dalam masyarakat pluralistik. Dalam buku tersebut juga disinggung peranan kiai dalam gerakan politik.²⁷

Buku *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* karya pemikir muda dalam bidang agama Ahmad Baso. Karya 'sejarah sosial' ini memang secara khusus menekankan kajian pada sejarah agama dan hukum Islam. Namun peneliti sengaja memasukkannya, karena salah satu bagian pentingnya mengkaji tentang perselingkuhan agama dan kekuasaan sejak masa kolonial.²⁸

Kajian lain adalah "*Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*" karya A. Muhaimin Iskandar. Buku ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada semua pihak untuk belajar memahami persoalan dengan melampaui teori atau syariat, agar proses sosial dan politik berjalan menuju tujuan yang disepakati.²⁹

Muhammad A.S. Hikam, dalam bukunya '*Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi di Indonesia*'. Secara khusus membahas tentang peranan publik dalam partisipasi politik di Indonesia. Dalam urusan partisipasi politik, wacana politik liberal tentang kewarganegaraan

²⁷ Zuly Qodir, *Islam Syariah Vis A Vis Negara : Teologi Gerakan Politik di Indonesia*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

²⁸ Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung : Mizan, 2005

²⁹ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, Jogjakarta : Klik R, Cet. Ke-1, 2006

menekankan keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik formal, seperti parpol, pemilu, parlemen dan lembaga politik formal lainnya.³⁰

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan diantaranya adalah buku hasil penelitian keterlibatan kiai dalam Pilkada Demak tahun 2007 yang diterbitkan oleh Gabungan Eksponen LSM dan Ormas (GELORA) Kabupaten Demak. Buku yang berjudul '*Semangat Membangun Demokrasi: Jejak Politik Kiai dalam Pilkada Langsung Kabupaten Demak tahun 2007*' tersebut merupakan sebuah refleksi peranan politik kiai dan santri dalam Pilkada Kabupaten Demak tahun 2007.³¹

Penelitian terhadap etika bernegara. Buku yang berjudul "*Membangun Negara Bermoral: Etika Bernegara dalam Naskah Klasik Jawa-Islam*" yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa (PP-IBJ) IAIN Walisongo Semarang, secara detail membicarakan pertemuan antara Islam dan Falsafah Jawa yang di dalamnya berisi tentang butir-butir etika bernegara, etika kepala negara, pegawai atau pejabat, militer dan warga negara.³² Kemudian buku '*Mengendalikan Syahwat Politik Kiai NU*' yang membicarakan bagaimana semangat kiai dalam panggung politik.³³

³⁰ Menurut penulisnya, Politik kewarganegaraan (*politics citizens*) seyogyanya meniscayakan keterlibatan aktif dari warga negara (*citizens*) sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Lebih lanjut lihat dalam Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 1999

³¹ M. Kholidul Adib, *Semangat Membangun Demokrasi: Jejak Politik Kiai dalam Pilkada Langsung Kabupaten Demak Tahun 2007*, Demak : GELORA, 2007.

³² Anasom (ed), *Membangun Negara Bermoral; Etika Bernegara dalam Naskah Klasik Jawa-Islam* Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002

³³ M. Kholidul Adib (*et all*), *Mengendalikan Syahwat Politik Kiai NU*, Semarang : Aneka Ilmu, 2004

Berangkat dari sekelumit tinjauan pustaka di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji perilaku politik kiai dan efektivitas peranannya sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sudut pandang (*stand point*) penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu satu model penelitian humanistik, yang menunjukkan tentang kehidupan masyarakat sosial, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan tingkah laku. Sifat humanis dari aliran pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial.³⁴

2. Lokasi Penelitian dan Sampel

Setting adalah tempat, latar atau situasi di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka data-data sepenuhnya diperoleh dari lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Penjelasan tentang *setting* terkait dengan subjek (pelaku) dan informan penelitian. Subjek (pelaku) adalah seseorang yang menjadi

³⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, hlm. 11.

objek pengamatan dalam suatu *setting* alamiah. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Kiai atau tokoh masyarakat, baik yang masuk dalam struktur maupun nonstruktural organisasi kemasyarakatan atau institusi lain yang terlibat dalam partai politik di Kabupaten Batang.
- b) Pengurus partai, partai yang dimaksud di sini adalah partai yang di dalamnya melibatkan kiai atau kiai sebagai pimpinan partainya.
- c) Simpatisan partai atau konstituen, adapun kriteria simpatisan partai adalah mereka yang sudah mempunyai hak pilih.

Dalam berfikir positivistik, dikenal dua cara pengambilan sampel, yaitu teknik *random* atau acak, dan teknik *purposive*.³⁵ Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang peneliti gunakan adalah teknik *purposif* sampling, yaitu informasi sampel yang peneliti dapat dari salah satu pihak. Dengan pengambilan secara *purposif*, hal-hal yang dicari dapat dipilih pada kasus-kasus ekstrim, sehingga hal-hal yang dicari tampil menonjol dan lebih mudah dicarai maknanya.³⁶

Sementara informan adalah siapa saja yang dapat memberikan keterangan atau data berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Pada umumnya, seorang subjek dapat sekaligus berperan sebagai informan

³⁵ Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil sampel lebih kecil, dan pengambilannya cenderung memilih yang *purposif* dari pada acak (*random*). Penelitian kualitatif lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk, dan biasanya membatasi pada satu kasus. Baca Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Rake Sarasin, Edisi. IV, 2000, hlm. 41-42

³⁶ *Ibid*, hlm. 149

dalam sebuah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, kepedulian peneliti kualitatif bukan pada banyaknya jumlah informan tapi pada kapasitas informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah salah satu pengurus partai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosial (*social-phenomenology*) dan antropologi, maka teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara dimanfaatkan sebagai media *check and balancing* dari berbagai data yang peneliti peroleh sebelumnya. Sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan realitas yang tersamar di balik sebuah data. Wawancara dilakukan disesuaikan dengan keberadaan responden dan tidak dalam kapasitas formal. Instrumen yang digunakan adalah alat perekam (*tape recorder*) dan tulisan tangan. Hal ini dikarenakan sebagian responden banyak yang enggan untuk diwawancarai. Sehingga peneliti cukup kesulitan untuk memperoleh data yang lengkap di lapangan.

b) Observasi

Observasi dimaksudkan sebagai kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terencana untuk menggambarkan kejadian dan perilaku yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti sekali

waktu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh partai, meskipun hanya sebatas rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan non-formal partai. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan observasi disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan partai.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik *deskriptif-analitik* yakni memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.³⁷ Teknik ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena keterlibatan kiai, terutama sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang, melalui data-data yang tersedia, dari hasil wawancara dan observasi.³⁸ Teknik ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang terhadap roda gerak partai.

Dalam penelitian ini bahan-bahan penulisan semaksimal mungkin mengacu pada sumber-sumber primer yang diperoleh dari lapangan, kemudian diklasifikasikan menurut bidang-bidangnya. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber sekunder berupa kepustakaan yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

Karena kajian tema ini menuntut aktualitas, maka peneliti juga mencermati wacana-wacana pendukung dan perkembangan mutakhir tentang peran kepemimpinan (politik) kiai di tanah air. Berita dan wacana di media

³⁷ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992, hlm. 210

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63

massa –surat kabar, majalah, jurnal, buletin dan newsletter- menjadi sumber tersier dalam penelitian ini. Termasuk kategori data ini adalah data yang diperoleh dari *website*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritik yang secara khusus membahas tentang politik kiai dan dimensi kepemimpinan dalam Islam. Bagian ini mencakup pengertian kepemimpinan, politik dan kiai; Dimensi kepemimpinan dalam Islam yang berisi tentang teori kepemimpinan, tipologi kepemimpinan dan syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Kepemimpinan kiai dan politik praktis menjadi penutup dalam bab ini.

Bab ketiga, mengetengahkan perilaku politik kiai dan peran strategis peran kepemimpinan kiai dalam politik praktis di Kabupaten Batang. Bagian awal pada bab ini akan membahas tentang kondisi geografis dan sosio-politis Kabupaten Batang, kemudian latar belakang keterlibatan kiai dalam politik, peran strategis dan efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan

partai politik di Kabupaten Batang. Terakhir adalah implikasi keterlibatan kiai dalam partai politik.

Bab keempat, merupakan bab analisa. Yaitu menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan disinergiskan dengan teori yang ada. Maka, dalam bab peneliti kemas dalam 'efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang dan implikasinya'. Bab ini merupakan tahapan analisis dari bab sebelumnya, yaitu bab dua dan tiga.

Bab kelima, adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan, beberapa saran dan kritik, serta kata akhir peneliti.

BAB II

POLITIK KIAI DAN DIMENSI KEPEMIMPINAN

DALAM ISLAM

A. Pengertian Kepemimpinan dan Politik

1. Pengertian Kepemimpinan

Dalam Islam, banyak istilah yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, antara lain adalah *imamah*, *khilafah*, *amir*, *sulthan* dan lain-lain.

Imamah menurut bahasa berarti “kepemimpinan”. Imam artinya “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya, baik ia memberikan petunjuk atau menyetatkan.¹ Menurut Ibnu Manzhur, *Imam* berasal dari kata dasar *Amama* yang mengandung banyak pengertian. Kata *Al-amm* berarti ‘tujuan’ atau ‘maksud’, kemudian *Imaaman* berarti mengimami atau ‘maju menjadi imam bagi mereka’. *Al-imam* berarti semua orang yang diangkat imam oleh suatu kaum, mereka di atas jalan yang lurus ataupun sesat’.

Sedangkan menurut al Jauhari, *imam* adalah yang dipanuti atau diteladani, dan *imam* bagi segala sesuatu adalah yang meluruskan atau memperbaikinya.²

Mengenai konsep *imam*, dalam Q.S. al-Baqoroh : 124, dinyatakan :

¹ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah 'Inda As-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, “Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar’i”, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, Cet. Ke-1, hlm. 15

² Muhammad Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul Sialmiyah*, Terj. Abdul Hayyi Al Kattani (*et al*), “Teori Politik Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 74.

æóÅöÐö ÇÈúÊóáóì ÅöÈúÑóÇãöíãó ÑóÈøðãð ÈößóáöãóÇÈò ÝóÃóÊóãøóãðäøó ÞóÇáó Åöäøöí ÌóÇÚöáðßó áöääøóÇÓö ÅöãóÇãðÇ ÞóÇáó æóãöäú ÐðÑøöíøóÊöí ÞóÇáó áóÇ íóäóÇáð ÚóãúÏöí ÇáÙøóÇáöãöíäó

Artinya. “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku" Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".³

Istilah kepemimpinan yang kedua adalah *khalifah*. Awal penyebutannya adalah kepada Abu Bakar r.a ketika terpilih setelah baiat as-Saqifah, untuk menggantikan Rasulullah saw. dalam memimpin umat Islam dan memelihara kemaslahatan mereka.⁴ Sebagai istilah teknis, baik dalam al-Qur’an maupun sepeninggal Nabi, penggunaan kata *khalifah* mempunyai dua konteks pengertian. *Pertama*, pengertian filosofis yang menyangkut semua predikat. *Kedua*, menyangkut pengertian politis yang berhubungan dengan konsep kenegaraan⁵

³ Q.S. Al Baqoroh : 124, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag, 2005

⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilayaatud-Diiniyyah*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani (*et all*), “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2000, hlm. 78

⁵ Jimly Asshidiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 28

Dalam pengertian yang pertama terlihat mengandung sifat filosofis dan berlaku secara *universal*, manusia merupakan *kholifah* Allah di bumi.

Dalam Q.S al-Baqoroh : 30, dinyatakan :

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".⁶

Keberadaan manusia sebagai ‘khalifah dimuka bumi’ adalah untuk mengelola dan mengolah alam semesta, untuk memimpin atau mengurus kehidupan dunia sesama manusia dalam arti yang sempit, dan memimpin sebagian yang lain dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian kedua lebih bersifat politis, berkaitan dengan konsep kekuasaan negara maupun dengan konsep kepemimpinan masyarakat.⁷

Pada awal pertumbuhan Islam, telah terjadi pembedaan secara jelas antara istilah ‘*Khalifatu Allah*’ dan ‘*Khalifat ar-Rasul*’. Konsep ‘*Khalifat ar-Rasul*’ merupakan penerapan kata *khalifah* dalam urusan politik. Sepeninggal wafatnya Nabi, istilah kedua ini secara spesifik berkaitan dengan konsep kepemimpinan, baik dalam ranah politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, *Khalifatu ar-Rasul* berubah maknanya menjadi ‘kepala negara’ dalam pengertian modern.⁸

⁶Depag, Q.S. Al Baqoroh : 30

⁷Jimly Asshidiqie, *Op. Cit*, hlm 28-29

⁸*Khalifatu ar-Rasul* yang terkenal adalah empat khalifah pertama yang disebut ‘*khulafau ar-Rasyidin*’. Penyebutan ‘kepala negara’ demikian ini terus berlangsung dalam sejarah Islam di masa dinasti Umayyah, Abasiyah dan seterusnya sampai ke masa dinasti Ottonoman di Turki. *Ibid*, hlm. 32

Konsep yang juga lazim dipahami untuk menunjuk kepada pengertian pemimpin ini dalam al-Qur'an adalah istilah '*ulul amri*'. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa : 59 :

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".⁹

Selain istilah *imamah* dan *khalifah*, istilah '*amirul mu'minin*' juga menjadi bagian dari kepemimpinan. Gelar yang diberikan kepada Umar bin Khotob.¹⁰

Terdapat perbedaan antara seorang pemimpin dan nabi. Nabi bertugas sebagai pemandu, pembimbing, juga memberikan sarana untuk melintasi jalan dalam mencapai tujuan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang membuat pengikutnya mudah untuk mencapai tujuan, mengawasi, memimpin, dan memperhatikan umat Islam.¹¹ Ada kalanya seseorang tersebut menjadi nabi sekaligus pemimpin, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah saw.

Meminjam istilah Akbar Tanjung, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang guna mempengaruhi, memotivasi, dan mengaktivasi aneka potensi dan sumber daya yang ada, sehingga

⁹ Depag, Q.S. An-Nisa : 59

¹⁰ Imam al-Mawardi, *Op. Cit*, hlm. 82.

¹¹ Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta*, Jakarta : Lentera, 1991, hlm 432-433.

organisasi yang dipimpinnya mampu berjalan secara efektif dalam rangka mengupayakan perwujudan tujuan-tujuannya.¹²

Secara umum, kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Mereka yang memegang jabatan sebagai pemimpin menerapkan seluruh atribut kepemimpinannya (keyakinan, nilai-nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan ketrampilan).¹³

2. Pengertian Politik

Politik secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *polis*¹⁴; berarti kota, kota yang dimaksud dalam kebudayaan Yunani Kuno sama dengan apa yang kita sebut dengan negara pada saat itu.¹⁵ Dalam bahasa Inggris kata *politic* menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan,¹⁶ ia juga dapat diartikan cerdas, dan bijaksana.¹⁷ Sedangkan dalam bahasa Latin *politea* berarti negara atau lebih tepat negara kota.¹⁸ Dalam bahasa Arab disebut *siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi *siasat*.¹⁹

¹² Akbar Tanjung, *Kepemimpinan Politik Yang Negarawan*, www.sekretariatnegara.com. 22/11/2008, hlm. 1

¹³ *Ibid*

¹⁴ B.N Marbun, *Op. Cit.*, hlm 444-445.

¹⁵ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2006, hlm. 16

¹⁶ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan dan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2002, hlm. 34

¹⁷ Inu Kencana Syafei dan Azhari, SSTP, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 6

¹⁸ Ahmad Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm 20.

¹⁹ Abdul Muin Salim, *Op. Cit.* hlm. 34

Politic kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mempunyai tiga arti, yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.²⁰

Pemakaian kata tersebut muncul pada abad ke 5 SM. Para filsuf Yunani seperti Plato (427-347 SM) menggunakan kata tersebut dalam bukunya “*Politeia*” yang berisi tentang soal-soal kenegaraan, demikian juga dengan Aristoteles dalam bukunya “*Politica*”.²¹

Aristoteles dalam teori klasiknya mengemukakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, mendefinisikan “politik” sebagai; pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan; segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; cara bertindak – bahkan kebijaksanaan dagang.²³

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983, hlm 2739

²¹ Ahmad Zainal Abidin, *Op. Cit*, hlm. 20.

²² Inu Kencana Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 7

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Ed. Ke-3, 2002, hlm. 886.

Politik juga bisa diartikan sebagai sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Maka politik adalah seni mengatur, mengurus negara dan ilmu ketatanegaraan, yang mencakup kebijaksanaan dan cara bertindak untuk mencapai tujuan bersama.²⁴ Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan.²⁵

Beberapa pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan “Politik”. Munawir Sadzali mendefinisikan politik sebagai suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana untuk menentukan, kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.²⁶

Meminjam istilah Muhaimin Iskandar, “politik bukan melulu kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan negara dan masyarakat, lebih dari itu merupakan kegiatan dengan mana konflik sosial diartikulasikan dan –meskipun tidak selalu berhasil– dicari pemecahannya.

“Esensi politik adalah fungsi, karena ia berkaitan dengan *hal ihwal*

²⁴ B.N Marbun, *Op. Cit* , hlm. 445.

²⁵ A. Muhaimin Iskandar, *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Social di Tingkat Basis: Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta : DPP PKB, 2000. hlm. 32

²⁶ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UIP, 1990, hlm. 42

mencari, mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan”. Secara praktis, politik adalah soal ‘siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara bagaimana’.²⁷

Dengan demikian, secara umum dapat dirumuskan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan bersama dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sementara untuk menentukan tujuan-tujuan itu diperlukan pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan umum yang di dalamnya diatur pembagian tugas dan wewenang dari sumber kekuasaan yang ada.

B. Pengertian Kiai dan Tipologinya

1. Pengertian Kiai

Selanjutnya adalah istilah ‘Kiai’. Di Indonesia beragam sebutan yang diperuntukkan bagi ulama’. Di daerah Jawa Barat (Sunda) orang meyebutnya “Ajengan”, di Sumatra Barat disebut “Buya”, di daerah Aceh dikenal dengan “Teungku”, di Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama “Tofanrita”, di Madura disebut dengan “Nun” atau “Bendara” disingkat “Ra”, dan di daerah Lombok atau seputar daerah wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan “Tuan Guru”.²⁸

²⁷ A. Muhaimin Iskandar, *Op. Cit*, hlm. 34.

²⁸ Hartono Ahmad Jaiz, *Bila Kiai Dipertuhankan : Membedah Sikap Keberagamaan NU*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001, hlm. 29-30.

Bagi masyarakat Jawa, gelar yang diperuntukkan bagi ulama antara lain “Wali”, “Panembahan”, juga dikenal istilah “Kiai” yang merupakan gelar bagi para ulama pada umumnya. Karena itu, sering dijumpai di pedesaan Jawa panggilan “Ki Ageng” atau “Ki Gede”, juga “Kiai Haji”.²⁹

Kata kiai berasal dari bahasa Jawa Kuno "kiya-kiya" yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan dalam pemakaiannya dipergunakan untuk: *pertama*, benda atau hewan yang dikeramatkan, seperti Kiai Plered (tombak), Kiai Rebo dan Kiai Wage (gajah di kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta). *Kedua*, orang tua pada umumnya. *Ketiga*, orang yang memiliki keahlian dalam Agama Islam, yang mengajar santri di Pesantren.³⁰ Selain mendapat gelar kiai, ia juga sering mendapat gelar ‘ulama’ yakni orang yang cukup mendalam pengetahuan agama Islam.³¹ Ulama berasal dari bahasa Arab dan semula ia berbentuk jamak, yaitu ‘*alima*’ artinya adalah orang yang memiliki ilmu mendalam, luas dan mantap.³² Namun, banyak juga orang alim yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat mendapatkan sebutan kiai, meskipun tidak mempunyai podok pesantren.³³

Meminjam istilah Syaikh Nawawi Al Bantani, ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara’ untuk menetapkan sahnya

²⁹ *Ibid*, hlm 30.

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. Hlm. 55

³¹ B.N Marbun, *Loc. cit*, hlm. 544.

³² Ahmad Haedari, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 3

³³ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amalaiah, Uswah*, Surabaya : Khalista, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 127

agama, baik pencapaian sah i'tikad maupun amal syari'at lainnya.³⁴ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, secara naluri “ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan”. Orang yang maksiat hakikatnya bukan ulama.³⁵

Menurut Endang Turmudi, penggunaan istilah ulama' berbeda dengan kiai. Untuk membedakan istilah kiai dan ulama' bisa dilihat dari pengaruh dan perannya dimasyarakat. Ulama' adalah istilah yang lebih umum yang merujuk pada pribadi muslim yang berpengetahuan.³⁶ Namun kalau dilihat dari sudut bahasa, kata ulama' adalah bentuk jama' dari kata *al aliim*, yang berarti memiliki pengetahuan.³⁷

Menurut Munawir Sjadzali, untuk menjadi seorang ulama yang terus berperan sesuai dengan perkembangan zaman, seseorang perlu memiliki tiga hal. *Pertama*, memiliki komitmen hanya dengan Islam. *Kedua*, integritas ilmunya tidak diragukan, artinya taat, disiplin, mengikuti ketentuan ilmiah, dan tidak memperdagangkan ilmu. *Ketiga*, loyal kepada umat dan bangsa.³⁸

Bahkan menurut Clifford Geertz “tidak setiap guru dalam pesantren, sekalipun guru agama disebut kiai. Banyak syarat yang harus ditambahkan

³⁴ Pengertian ‘Ulama’ menurut Syaikh Nawawi Al Bantani dalam Badrudin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 46.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004, hlm. 29

³⁷ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1. 2007 hlm. 27

³⁸ Badrudin Hsubky, *Op. Cit*, hlm. 46

pada seorang guru di pesantren untuk dapat disebut kiai, antara lain dari segi ilmu, kualitas kepribadian, atau kepemimpinannya”.³⁹

2. Tipologi Kiai

Dalam banyak studi mengenai kiai, dalam tesisnya, Ahmad Fauzan mengklasifikasikan tipologi kiai ke dalam lima tipe,⁴⁰ yaitu:

- a) Kiai Langgar, yaitu kiai yang mengajar para santri di langgar atau di musholla kecil. Biasanya kiai ini tinggal di desa-desa yang tidak memiliki pondok pesantren yang dihuni oleh para santrinya, tetapi kiai ini mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat sekitar.
- b) Kiai Pesantren, yaitu kiai yang mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh para santri yang menuntut ilmu agama dari pelosok kampung. Di pondok pesantren inilah seorang kiai mengajarkan berbagai kitab klasik kepada para santrinya.
- c) Kiai Mubaligh, yaitu kiai yang melaksanakan dakwah dan pengajian di desa-desa dan tempat lain. Biasanya kiai ini tidak memiliki pondok pesantren layaknya kiai pesantren lainnya.
- d) Kiai Politik, yaitu kiai yang banyak terjun kedalam politik praktis meskipun dia menyempatkan diri dalam proses pembelajaran di madrasah dan pesantren.
- e) Kiai Madrasah, yaitu kiai yang tugas dan pekerjaannya adalah mengajar para santri di madrasah.

³⁹ Lihat Clifford Greetz dalam M. Dawan Raharjo, *Intelektual Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa : Risalah Cendawan Muslim*, Bandung : Mizan, Cet. Ke-1, 1993, hlm 171.

⁴⁰ Ahmad Fauzan, “Kepemimpinan Kiai”, Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004, hlm. 23

Sedangkan Endang Turmudzi dari hasil penelitiannya di Jombang Jawa Timur, mengklasifikasikan kiai menjadi empat tipe,⁴¹ sebagai berikut:

- a) Kiai Pesantren, adalah kiai yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan di pondok pesantren untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dipondok pesantren.
- b) Kiai Tarekat adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan-kegiatan membangun batin (dunia hati) umat Islam.
- c) Kiai Politik merupakan katagori campuran. Namun ia lebih *concern* dalam masalah politik praktis, baik terjun sebagai struktural maupun sebagai jurkam sebuah partai politik.
- d) Kiai Panggung adalah kiai yang memusatkan pada kegiatan dakwah untuk mengembangkan ajaran Islam.

Dari sedikit pemaparan di atas, kebanyakan orang akan lebih mudah menggunakan istilah kiai dari pada ulama. “*Kiai itu yang dimunduk-munduki atau sangat dihormati dan ditaati serta ditakuti*”, maka tampaknya justru sebutan kiai itulah yang lebih diminati.⁴²

C. Dimensi Kepemimpinan dalam Islam

Dalam kepemimpinan, terdapat dua dimensi yang perlu dikembangkan, *pertama*, berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan aktifitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpin. *Kedua*, berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, yang

⁴¹Endang Turmudi, *Op. Cit*, hlm. 32-34

⁴²Hartono Ahmad Jaiz, *Op. cit*, hlm. 39.

dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemimpin.⁴³

Bagaimana agar kedua dimensi ini dapat berjalan dengan baik. Ada dua tugas pokok yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. *Pertama*, tugas yang berkaitan dengan kinerja organisasi. *Kedua*, tugas yang berkaitan dengan menjaga hubungan dinamis antara pengurus, anggota kelompok dan organisasi.⁴⁴

1. Teori-Teori dan Tipe Kepemimpinan

Secara teoritis terdapat dua pandangan mengenai pemimpin dan kepemimpinan, dari mana ia berasal. *Pertama*, teori genetik (*genetic theory*), yang menyebut bahwa pemimpin dan kepemimpinan ditentukan oleh faktor genetik (turunan). *Kedua*, teori yang mencatat pentingnya karakter / kepribadian / kharismatik.⁴⁵ *Ketiga*, teori pengaruh lingkungan (*behavioral theory*), atau sering kita kenal dengan teori sosial.⁴⁶

Dalam khasanah kepemimpinan organisasi/kelompok, setidaknya ada tiga tipe atau gaya kepemimpinan,⁴⁷ yaitu :

- a) Tipe Otoriter/direktif, yaitu semua kegiatan terpusat pada pemimpin, sedangkan orang lain diberi sedikit kebebasan untuk berkreasi dan bertindak seperti keinginan pemimpin.

⁴³ A. Muhaimin Iskandar, *Politik Pelayanan Basis*, Jakarta : DPP PKB, 2000, hlm. 71.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Kepemimpinan karismatik selama ini selalu identik dengan pengamatan pemimpin di politik dan keagamaan bukan kepemimpinan organisasi dan perusahaan. Para ahli sepakat mengartikan karisma sebagai "suatu hasil persepsi para pengikut dan atribut-atribut yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan aktual dan perilaku dari para pemimpin dalam konteks situasi kepemimpinan dan dalam kebutuhan-kebutuhan individual maupun kolektif para pengikut". Lihat dalam Gary Yulk. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, terj. Jusuf Udaya, Jakarta : Prehalindo, 1994, hlm. 269.

⁴⁶ A. Muhaimin Iskandar, *Kepemimpinan Politik yang Negarawan*, *Op. Cit.* hlm. 2

⁴⁷ A. Muhaimin Iskandar, *Op. Cit.* hlm. 64-65

- b) Tipe Konsultatif. Tipe ini memberi fungsi pemimpin sebagai tempat konsultasi, pemberi bimbingan, motivator, memberi nasihat dalam rangka mencapai tujuan.
- c) Tipe Partisipatif. Tipe ini bertolak dari tipe konsultatif yang berkembang ke arah saling percaya antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan orang lain, banyak mendengar, menerima, bekerjasama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan.

Di samping beberapa teori di atas, masih banyak teori-teori dalam kaitannya dengan kepemimpinan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Teori Psikoanalitik (*Psychoanalytic Theory*), teori yang menginterpretasikan pemimpin sebagai figur seorang ayah, sebagai sumber kasih dan ketakutan, simbol *superego*, tempat pelampiasan kekecewaan, frustrasi dan *agresivitas* para pengikut, tetapi juga sebagai orang yang membagi kasih kepada pengikutnya.⁴⁸ Karena itu, pemimpin seperti ini cenderung mampu untuk membangkitkan keyakinan, mampu mengartikulasikan cita-cita dan ide.
- b) Teori Manusiawi (*Humanistic Theory*). Teori ini menekankan tumbuh kembangnya organisasi yang efektif dan kohesif. Fungsi kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi sedemikian rupa sehingga orang-orang dalam organisasi merasa memiliki kebebasan untuk merealisasikan potensi motivasionalnya dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi juga pada saat yang bersamaan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.⁴⁹
- c) Teori Pertukaran (*Exchanges Theory*). Bahwa sebenarnya interaksi sosial merupakan suatu bentuk pertukaran (*a form of exchange*) yang anggota-anggota kelompok memberi dan menerima kontribusi secara sukarela atau cuma-cuma.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 67

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 68

2. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Menurut Imam Al-Mawardi berkaitan dengan masalah kepemimpinan, terdapat beberapa ayat al-Quran yang telah menunjukkan secara jelas kriteria seorang pemimpin, diantaranya adalah Q.S. Al-Baqarah: 119 disebutkan :

أَوَلَمْ نُنزِلْكَ مِنَ السَّمَاءِ الْهَدْيَ الْبَيِّنَاتِ
الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَاتُ الْوَحِيدُ
الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَاتُ الْوَحِيدُ
الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَاتُ الْوَحِيدُ
الَّذِي هُوَ الْبَيِّنَاتُ الْوَحِيدُ

Artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus engkau (Muhammad) dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka".⁵⁰

Di kalangan ulama, banyak perbedaan mengenai syarat-syarat seorang pemimpin. Al-Mawardi memberikan tujuh syarat, yaitu⁵¹:

- a) Keadilan (*al-'adalah*) atas syarat yang menyeluruh.
- b) Memiliki pengetahuan yang memungkinkan untuk berusaha keras (*ijtihad*) dalam berbagai persoalan termasuk hukum.

⁵⁰ Q.S. al-Baqoroh : 119 dalam Imam Al Mawardi, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilayaatud-Diiniyyah*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani (*et all*), "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2000, hlm 17

⁵¹ *Ibid*, hlm 17-18

- c) Sehat indranya, baik pendengaran, penglihatan, dan lisan agar dapat secara benar apa yang didapatinya.
- d) Sehat anggota badannya dari berbagai kekurangan
- e) Kreatif dalam mengatur rakyat dan mengupayakan kebaikan.
- f) Memiliki keberanian dan keteguhan untuk memelihara dari berbagai hambatan, termasuk serangan musuh
- g) Nasab Quraisy, karena dalil yang disepakati "*al-aimmatu min Quraisy*".

Sedangkan Ibnu Rabi' mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala negara,⁵² yaitu

- a) Kebapaan dan berasal dari keluarga raja
- b) Bercita-cita besar yang bisa diperoleh melalui pendidikan dan akhlak
- c) Berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka
- d) Tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan
- e) Memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan negara dan memeratakan keadilan

⁵² Keterangan ini dikutip dalam Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 254.

- f) Memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi. Untuk itu, ia harus bersikap santun dan hormat kepada mereka.

Menurut penulis, syarat yang pertama (Ibnu Rabi') jika dikorelasikan dengan konteks sekarang, "keluarga raja" adalah keluarga priyayi, termasuk keluarga *ndalem* atau kiai.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah orang yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwwat*) dan integritas (*al-amanat*).⁵³

Di kalangan bani Umayyah, *khalifah* dipandang sebagai wakil Tuhan yang sering disalahgunakan untuk mengeksploitasi rakyat dan diidentikan dengan raja yang selalu dilayani masyarakat. Namun di masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis terjadi pergeseran.⁵⁴ Sebaliknya, khalifah (pemimpin) adalah pengajar dan pendukung bagi yang mau belajar, pelurus setiap penyimpangan, menindak koruptor, pelindung bagi yang lemah, penegak keadilan bagi para penindas, pelindung kaum yang lemah dan pendukung bagi yang lebih besar.⁵⁵

Dalam perspektif Islam, disebutkan adanya empat sifat/karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah

⁵³ *Ibid*, hlm. 257

⁵⁴ Rohadi Abd. Fatah, *Islam and Good Governance : Ijtihad Politik 'Umar Bin 'Abdul 'Azis*, Tangerang : LeKDis, Cet. ke-1, 2007, hlm 112

⁵⁵ *Ibid*, hlm 114

saw. yakni *sidiq* (benar, jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (komunikator), dan *fathanah* (cerdas).⁵⁶

Sifat-sifat tersebut, selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern, di mana setiap pemimpin harus memiliki visi, manusia pembelajar, memiliki ide-ide besar yang visioner dan menjadi referensi utama bagi yang dipimpin. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan (*ability*) dan kapasitas (*capacity*), antara lain: keahlian/kecakapan (*skill*) dalam berkomunikasi, memotivasi, dan yang lainnya; pengetahuan/wawasan (*knowledge*); pengalaman (*experience*); kemampuan mengembangkan pengaruh (*influence*); kemampuan menggalang solidaritas (*Solidarity maker*); serta kemampuan memecahkan masalah (*decision making*). Di atas semua itu, seorang pemimpin harus total dalam mengerahkan segenap potensi yang ada pada dirinya untuk kemajuan organisasi (*prinsip totality*).⁵⁷

Disamping beberapa syarat di atas, seorang pemimpin harus disertai seperangkat kepribadian yang baik, positif dan konstruktif,⁵⁸ yaitu :

- a) Syarat moral, yakni kejujuran, integritas yang tinggi, amanat, bertanggung jawab, konsisten, tidak korup dan taat pada kesepakatan.
- b) Syarat Intelektual, yakni kemampuan berpikir kritis, kreatif, terbuka terhadap perkembangan, argumentatif, jernih dan strategis.

⁵⁶ Muhammad Diaudin Rais, *Op. Cit.* hlm. 19

⁵⁷ Akbar Tanjung, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁵⁸ A. Muhaimin Iskandar, *Politik Pelayanan Basis, Loc. Cit.* hlm. 74-75

- c) Syarat manajerial, yakni kemampuan mengelola organisasi, bekerja dengan prioritas, produktif, pro-aktif, kaya alternative, mampu menangkap kepentingan konstituen, dapat memotivasi dan mendorong kreatifitas, edukatif, dalam menjalankan strategi organisasi serta dapat menjabarkan konsep dalam tindakan-tindakan praktis.

D. Kepemimpinan Kiai dan Politik Praktis

Dalam sejarah Indonesia, keterlibatan kiai dalam politik bukan barang baru bagi kita. Dimulai sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini, keterlibatannya masih mewarnai politik di Indonesia. Meskipun kuantitas dan kualitas setiap periode berbeda-beda, kita tidak bisa menafikkan peranan kiai dalam proses pewarnaan politik di Indonesia.⁵⁹

Diskursus tentang politik kiai, nampaknya sulit untuk lari dari keterkaitan antara kiai pesantren, organisasi Nahdlatul Ulama' (NU), dan dunia politik. NU sebagai organisasi keagamaan yang sudah berdiri sejak tahun 1926, yang didirikan oleh para ulama' pesantren telah banyak memainkan peran penting dan sangat berpengaruh baik dunia politik maupun masyarakat Indonesia.⁶⁰

Meskipun tujuan utama pendirian NU adalah untuk mengembangkan dan menegakkan paham *ahlus sunnnah wal jama'ah*, NU juga terkadang

⁵⁹ Achmad Patoni, *Op.Cit.* hlm. 152-153

⁶⁰ Slamet Effendi Yusuf, M. Ichwan Syam, dan Masdar Farid Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 18

dipergunakan sebagai alat perjuangan politik. Pada perkembangannya keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari, utamanya ketika bangsa Indonesia membutuhkan perjuangan NU. Posisi kiai yang merupakan pemimpin NU dan pemimpin pesantren, mau tidak mau “harus” terlibat dalam politik praktis.⁶¹

Karena kiai memiliki “aset” yang tak ternilai harganya baik di lingkungan pesantren, NU, dan politik yang berupa kharisma, pengetahuan agama, para santri, dan para kaum tradisional yang mendukungnya. Keadaan inilah yang kemudian menjadikan *bargaining* tersendiri bagi kiai dalam posisi politik.⁶²

Sebagai pranata sosial, kiai juga mengalami dinamikanya sendiri. Dulu, hampir semua kiai digolongkan sebagai kiai kultural dan basis kekuatan moral, sebagai pengasuh pesantren misalnya. Namun kini, kemunculan kiai struktural sudah bukan barang asing lagi. Bahkan fenomena saat ini memperlihatkan, para kiai (dan gus) secara 'berjamaah' meluncur ke panggung politik praktis.

Menurut Ahmad Patoni, alasan yang mempengaruhi seorang kiai terlibat dalam politik praktis, adalah:

- a) Alasan teologis. Para kiai pesantren adalah figur yang lekat dengan penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak *sunni*. Dalam perspektif ini, hubungan antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*) dalam tradisi *sunni* pada dasarnya mempunyai hubungan dan

⁶¹ Endang Turmudi, *Op. Cit.* hlm. 147-148

⁶² Achmad Patoni, *Op.Cit.* hlm. 172

tidak bisa dipisahkan secara tegas. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi.⁶³

- b) Alasan dawah. Da'wah merupakan usaha sosialisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui jalur politik. Banyak kiai yang berasumsi bahwa dengan jalur ini, medan dakwah akan semakin luas, terbuka dan berjalan dengan efektif.⁶⁴
- c) Alasan solidaritas politik yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai pesantren mau tidak mau harus terjun kedalamnya.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis menurut Khoiru Ummatin⁶⁵ adalah:

- a) Faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat.
- b) Faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik.
- c) Faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan.
- d) Budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik.

Dinamika ini melahirkan persepsi baru tentang kekinian para kiai di mata masyarakat. Bagi sebagian kalangan, keterlibatan kiai dalam politik menjadi keniscayaan yang tak harus diperdebatkan. Sebab, menurut mereka ajaran Islam bersifat *holistik*; bukan sekadar agama, melainkan *din wa daulah*. Pandangan tersebut adalah benar, namun tidak sepenuhnya benar. Benar karena pada dasarnya mereka menghendaki agar kesucian, keluhuran

⁶³ *Ibid*, hlm. 153

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 155

⁶⁵ Khoiru Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 32-33

moral, dan tugas mulia kiai sebagai *cultural broker*⁶⁶ dan pencerah umat, tidak terkontaminasi oleh ‘kesan negatif’ politik.

Figur kiai di dunia politik nasional dianggap demikian berharga sehingga tidak jarang mereka terlibat “bermain” dan “dimainkan.”⁶⁷ Hal ini dapat kita lihat misalnya pesantren sering dijadikan sebagai basis dukungan moral dalam menentukan arah perpolitikan terutama terkait dengan suksesi kepemimpinan nasional di negeri ini.⁶⁸

Secara tradisional, ulama (kiai) dalam kehidupan masyarakat dipandang memiliki beberapa fungsi dan sekaligus posisi. Fungsi dan posisi demikian berhubungan dengan kemampuan profesional ulama, yaitu sebagai kelompok orang yang dipandang memiliki kemampuan intelektual, memahami dan menjelaskan maksud ajaran Islam.⁶⁹

Menurut peneliti terjun atau tidak ke politik sepenuhnya bergantung pada asas manfaat dan ketahanan diri kiai menghadapi godaan materi dan hegemoni. Apakah keberadaannya dalam peran-peran politik dapat menciptakan harmoni yang dinamis dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, ataukah justru menciptakan disharmoni yang statis dan keberpihakan

⁶⁶ Kiai dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh pesantren, tetapi ia juga adalah tokoh masyarakat yang disegani, sehingga pesantren juga berfungsi sebagai *cultural broker*. Lihat dalam HM. Amin Haidari & Abdullah Hanif (ed), *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas*, Jogjakarta :IRD Press, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 213

⁶⁷ M. Kholidul Adib ach. (ed). *Mengendalikan Syahwat Politik Kiai Nu; Meneguhkan Hittah 1926 Sebagai Komitmen Gerakan*, Semarang : Aneka Ilmu, 2004, hlm. x

⁶⁸ HM. Amin Haidari dan Abdullah Hanif (ed), *Op. cit*, hlm. 214

⁶⁹ Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah*, Jogjakarta : Fajar Pustaka Baru, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 61

kelompok semata (partai), atau bahkan kepentingan pribadi. Hal ini yang seharusnya direnungkan kembali.

BAB III

LATAR BELAKANG DAN PERAN KEPEMIMPINAN KIAI

DALAM POLITIK DI KABUPATEN BATANG

A. Kondisi Geografis

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha.

Batas-batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, terutama Ibu kota pemerintahannya terletak pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Jarak Kabupaten Batang dengan daerah-daerah lain : Pekalongan 9 km, Pemalang 43 km, Tegal 72 km, Brebes 85 km, Cirebon 144 km, Jakarta 392 km, Kendal 64 km, Semarang 93 km dan Surabaya 480 km. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata diatas 2000 m, yaitu : Gunung Prau tinggi 2565 dpal, Gunung Sipandu tinggi 2241 dpal, Gunung Gajah Mungkur tinggi 2101 dpal, Gunung Alang tinggi 2239 dpal, Gunung Butak tinggi 2222 dpal.

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

Wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut : latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan

dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan Negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.¹

2. Kondisi Sosio-Politis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pembagian wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Adapun lima belas kecamatan itu antara lain: Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Warungasem, Wonotunggal, Bandar, Pecalungan, Blado, Subah, Banyuputih, Gringsing, Limpung, Bawang, Reban, Tersono.

¹ Data sejarah Kabupaten Batang ini didapat dari Batang Online, www.kabupatenbatang.go.id. Tanggal 2 Nopember 2008

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2006 tercatat sejumlah 694.453 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,63% bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar 690.134 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Penduduk perempuan di Kabupaten Batang pada tahun 2006 sebesar 347.990 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 346.463 jiwa. Rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 99,56.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang adalah rendah. Dari 628.104 jiwa yang merupakan usia sekolah, hanya 8.635 jiwa yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Sedangkan yang berpendidikan SMA sejumlah 40.817 jiwa atau sekitar 6,49%.

Dari jumlah penduduk yang ada, mayoritas penduduk Kabupaten Batang bergama Islam, yakni sekitar 80 %. Kemudian Kristen dan Katolik sekitar 12 %, Hindu dan Budha sekitar 7 %.

Dengan jumlah mayoritas inilah, banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non formal seperti sekolah swasta dan pesantren. Disamping itu, juga banyak berdiri organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti NU dan Muhammadiyah serta organisasi-organisasi kecil lainnya seperti Rifaiyah dan LDII.

Basis pesantren disertai dengan menjamurnya organisasi kemasyarakatan inilah yang kemudian mampu menarik perhatian para politisi untuk menarik para pimpinan pesantren untuk ikut terjun dalam

politik praktis. Pola kepemimpinan pesantren yang patriarkal dengan model *patron client*, akan sangat strategis untuk kebesaran partai. Terlebih pada event-even suksesi nasional, keberadaan lembaga-lembaga tersebut menjadi lahan yang *empuk* bagi para elit partai.

Tidak mengherankan ketika kemudian orientasi politik warga muslim Kabupaten Batang cenderung pada pilihan partai yang berlabelkan Islam, seperti PPP, PKB, Partai amanat Nasional (PAN), dan partai-partai Islam kecil lainnya. Meskipun dalam kenyataannya partai islam tidak berhasil mendominasi perolehan suara terbanyak pada pemilu 2004 lalu yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disusul dengan PKB, PPP, PAN dan Golkar. Menurut penulis, kemenangan dan kebesaran partai moncong banteng tersebut diakibatkan oleh rasa kecewa yang mendalam terhadap partai Golkar, sehingga beralih mendukung PDIP. Sedangkan simpatisan PPP dan PKB adalah simpatisan yang loyal. Hal ini terbukti di beberapa daerah basis, seperti di bagian Batang Selatan dan Timur yang berbasis pesantren. Sementara basis PDIP lebih banyak dijumpai di daerah pantura. Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Batang, jumlah pemilih tetap pada Pilkada 2006 sebesar 521.553. Pemilih laki-laki sebanyak 258.333, sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 263.220.²

² Caswiyono Rusydi (*ed all*), *Pilkada Batang 2006; Gerbang Menuju Demokratisasi Lokal*, diterbitkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang, 2006, hlm. 32

B. Latar Belakang Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis

1. Latar Belakang Kiai dalam Politik Praktis

Dua partai politik di Kabupaten Batang yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keberadaan kiai tidak sekedar untuk pelengkap partai, tetapi lebih banyak menjadi elit, yaitu sebagai pimpinan partai, baik di tingkatan cabang (DPC), kecamatan (DPAC) maupun desa (PR). Pada penelitian ini, akan difokuskan pada peran politik kiai dalam DPC PPP dan PKB Kabupaten Batang, terutama sebagai pimpinan partai.

Diantara beberapa kiai yang menempati posisi garda depan partai tersebut antara lain adalah K.H. Ahmad Nur Khozin (ketua MPC DPC PPP), K.H. Ahmad Sholeh Ma'sum (Ketua Tanfidz DPC PPP), K Muhtadi (Ketua Dewan Syuro DPC PKB) dan Gus Fathurrahman (Ketua Tanfidziyah DPC PKB).

Selain sebagai pimpinan partai, mereka juga sebagai pimpinan pondok pesantren. K.H. Ahmad Nur Khozin dan K.H. Ahmad Sholeh Ma'sum merupakan pengasuh pondok pesantren Roudlotul Muhtadin Dlisen Limpung, keduanya juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan gerakan *Toriqoh*, bahkan sebagai *mursid* jama'ah *Toriqoh Qodiriyah wa Nahsyabandiyah*, yaitu salah satu gerakan *Toriqoh al Muktabaroh* yang ada di Kabupaten Batang.

Dalam partai politik K.H. Ahmad Nur Khozin merupakan seseorang PPP yang sangat disegani. Terbukti hingga saat ini masih dipercaya

sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (MPC PPP), dan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (MPW PPP) Jawa Tengah. Sedangkan K.H. Ahmad Sholeh Ma'sum, merupakan ketua Dewan Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Batang.

Demikian juga dengan K. Muhtadi. Disamping sebagai pimpinan partai, dia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Maarif Banyuputih, ketua *Robithoh Ma'had Al Islamiyah* (RMI) Kabupaten Batang dan kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Huda Banyuputih. Sementara Gus Rohman (panggilan akrab Fathurrahman) bukan merupakan pimpinan pondok pesantren, tetapi sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungannya. Selain sebagai ketua partai, ia juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang (periode 2004-2009) dan beberapa organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan lainnya.

Keberadaan mereka cukup diperhitungkan baik di kalangan politisi, eksekutif maupun legislatif. Hal ini terbukti ketika *event-event* politik di gelar, mulai dari Pilpres, Pilgub, Pilkada hingga Pildes. Hal ini terbukti dalam keterlibatan mereka dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2008. K. Nur Khozin dan K. Sholeh misalnya, keduanya menjadi pendukung pasangan Tamsil-Rozak Rais yang diusung dari PPP dan PAN. Demikian juga dengan K. Muhtadi dan Gus Rahman yang menjadi pendukung pasangan Agus-Kholiq yang diusung dari PKB. Kemudian pada Pilkada Batang

tahun 2006, disamping menjadi target *sowan* para Cabup-Cawabup, mereka juga masuk dalam tim kampanye. Peran yang sama juga tampak ketika suksesi nasional (Pilpres) dan pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu) digelar, mereka tercatat sebagai juru kampanye di masing-masing partainya.

Fenomena persinggungan kiai dalam politik bukan barang baru lagi bagi kita. Padahal, kesan yang muncul ketika kata politik *mencuat* di permukaan, ‘politik itu kotor, busuk, comberan, korup’ dan lain sebagainya. Secara otomatis, tanpa pengelolaan yang baik, para tokoh agama ini akan terkena getahnya. ‘Mengapa para kiai tersebut tertarik dengan dunia yang ‘jauh’ dengan latar belakang mereka?’

Menurut K.H. Nur Khozin (Mbah Nur), keterlibatan dirinya dalam politik praktis karena beberapa alasan. Pertama, PPP merupakan partai Islam yang didirikan oleh para ulama yang ‘ikhlas’. Kedua, al Qur’an juga mengajarkan umatnya untuk terlibat dengan segala aspek kehidupan, termasuk politik.³ Lebih lanjut sesepuh PPP ini mengatakan :

“Saya memilih PPP karena, pertama, partai berlambang ka’bah ini didirikan oleh para ulama yang ikhlas. Hal ini terbukti dengan keikhlasan mereka untuk menggabungkan empat partai besar, NU, Masyumi, Perti dan Parmusi dalam dalam satu wadah PPP. Kedua, sebagai warga muslim yang mayoritas, kita jangan sampai didholimi atau dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, kita harus tahu tentang politik, sehingga kita tidak mudah dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan kita tahu politik, harapan saya tidak akan terjadi barang *haq* di injak-injak, hingga kemudian tercipta *tanfidil hukmi* (tercipta keadilan hukum). Politik adalah mempertahankan, yaitu mempertahankan

³ Hasil wawancara dengan K.H. Nur Khozin, tanggal 10 Desember 2008

hak-hak kita sebagai warga negara. Karenanya, tidak ada salahnya jika kita terjun dalam dunia politik”.⁴

Sementara menurut penuturan Kiai Soleh, dirinya tidak tahu menahu soal pencalonannya sebagai pimpinan partai di PPP.⁵ Menurut penuturan beliau :

“Saya tidak tahu kalau saya dicalonkan sebagai ketua DPC PPP, namun karena dorongan teman-teman dan ternyata pilihan itu jatuh pada saya, saya mau apa lagi, akhirnya saya niati saja untuk berjuang melalui media partai politik ini. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk membesarkan partai, tentunya sesuai dengan landasan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Mudah-mudahan saja saya bisa memegang amanat ini dengan baik”.⁶

Tak jauh berbeda dengan K. Soleh, K. Muhtadi, satu hal yang menggugah semangatnya untuk *cawe-cawe* dalam politik adalah sinergisitas partai dengan NU.⁷ Bahkan secara tegas dia mengatakan bahwa ketika PKB tidak lagi mendapat restu dari NU, maka ia tidak akan berpihak pada PKB. Dia mengemukakan :

“Saya justru malah takut diberi tanggung jawab sebagai dewan syuro PKB, kalau tidak karena dorongan teman-teman, saya tidak mau menjadi dewan syuro, saya lebih memilih sebagai simpatisan biasa saja. Sebenarnya yang terlintas dalam hati nurani saya bukanlah terjun dalam politik, akan tetapi karena dorongan untuk bersama-sama membesarkan NU, maka sekalian saja saya niati untuk memperjuangkan NU melalui media politik. Dan jika NU secara kelembagaan melepaskan PKB, saya juga mungkin tidak akan mendukung PKB. Sebagai pimpinan partai saya berharap segenap jajaran kepengurusan yang ada di DPC dapat bekerja sama untuk membesarkan partai. Menjadikan partai yang benar-benar mampu menjadi media perjuangan umat”.⁸

⁴ *Ibid*

⁵ Hasil wawancara dengan K.H. Ahmad Soleh, tanggal 01 Januari 2009

⁶ *Ibid*

⁷ Hasil wawancara dengan K. Muhtadi, Tanggal 13 Desember 2008

⁸ *Ibid*,

Sementara menurut Gus Rahman (panggilan akrab Fathurrahman) politik merupakan panggilan jiwa. Menurutnya politik juga merupakan pengejawantahan dari konsep *din wa daulah*. Demikian penuturan Rahman:

“Tidak ada salahnya ketika kita terjun dalam dunia politik, sudah jelas dalam sirah Nabawiyah, selain sebagai pemimpin agama, Nabi juga menjadi pemimpin politik. di Batang, umat Islam mayoritas, tanpa adanya keterwakilan, kita hanya akan dijadikan sebagai boneka yang bisa dimainkan seenaknya demi kepentingan pihak lain. Agar kepentingan-kepentingan umat Islam terakomodasi dengan baik, harus ada yang menjadi wakil diantara kita. Saya tidak akan *muluk-muluk*, bagi saya politik adalah panggilan jiwa. Oleh karena itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan politik dan institusinya menjadi media yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.”⁹

Dari beberapa penuturan di atas, secara garis besar latar belakang keterlibatan kiai dalam politik praktis bukan karena kepentingan duniawi, seperti orientasi harta (*li al mal*) atau kedudukan (*li al jah*), tetapi lebih berorientasi pada kepentingan umum (*li al amm*). Beberapa catatan penting dari latar belakang keterlibatan kiai di atas, antara lain adalah :

- a) Dari sisi sejarah, kedua partai tersebut didirikan oleh para ulama dan berazas Islam.
- b) Karena tanggung jawab moral dan sosial sebagai pembimbing umat dan penjaga moralitas bangsa.
- c) Karena panggilan jiwa dan semangat untuk memperjuangkan kepentingan umat.

⁹ *Ibid*

- d) Karena ada sinergisitas dengan semangat perjuangan Islam dan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) misalnya.

2. Kiai Sebagai Pimpinan Partai Politik

Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, secara politis keberadaan kiai menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan partai. Terutama dalam mobilisasi massa. Benarkah terpilihnya kiai sebagai pimpinan partai politik di DPC PPP maupun PKB berangkat dari latar belakang di atas. Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa nara sumber.

A. Fauzi Fallas (Katib DPC PKB) mengatakan bahwa secara naluri kita bisa membedakan antara yang *haq* dan *batil*. Demikian juga dalam menentukan sebuah pilihan, hati nurani tidak bisa dibohongi.¹⁰ Lebih lanjut dia mengatakan :

“Kenapa pimpinan partai di PKB lebih banyak berasal dari kiai. Tentunya harus kita pahami bersama bahwa para pendiri PKB itu kan para ulama. Di Batang pun demikian, lahirnya PKB dibidani oleh para kiai, seperti K. H. Fauzi Mustofa (Bawang), K. Abdul Aziz (Warung Asem), K. Damanhuri (Subah) dan lain sebagainya. Sehingga jangan kaget jika kiai menjadi pilihan pertama sebagai pimpinan partai di PKB. Masyarakat lebih bisa memilih siapa yang layak dan bisa dipegang janjinya untuk memangku sebuah amanat, terlebih dalam organisasi politik. Nah, ini yang terkadang sulit untuk dipolitisir kalau sudah *kadung* cinta. Menurut saya tidak harus dari unsur kiai, siapapun bisa. Yang penting tahu tentang manajemen dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Lagi pula di PKB tidak ada aturannya”.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan H. A. Fauzi Fallas (Katib DPC PKB Kabupaten Batang), tanggal 18 Desember 2008)

¹¹ *Ibid*

Menurut Caswiyono Rusydie (salah satu wakil sekretaris DPC PKB) mengemukakan bahwa ketika berbicara kiai dalam struktur PKB, kita harus melihat dari dua aspek.¹² Demikian penuturan Caswiyono :

“Kenapa kiai sebagai pimpinan partai di PKB, ada dua sisi yang harus kita ketahui. *Pertama*, dari sisi sejarah, PKB merupakan partai yang didirikan oleh para ulama seperti K.H. Ma’ruf Amin, K. H. Abdurrahman Wahid, K.H. Mustofa Bisri, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran ketika kemudian kiai menjadi sebuah figur yang cukup diperhitungkan dalam partai. *Kedua*, dari sisi politik, kiai merupakan tokoh sentral dalam masyarakat yang mempunyai banyak pengikut. Karenanya, secara politis kiai cukup menguntungkan bagi kebesaran partai, terutama dalam mobilisasi massa. Tidak ada persyaratan khusus harus dari kiai atau gus dalam pola rekrutmen pemimpin partai di PKB. Adapun terpilihnya kiai sebagai pimpinan partai, seperti yang saya sampaikan di atas bahwa PKB didirikan oleh para kiai. Karenanya bukan sesuatu yang baru ketika pimpinan partai di PKB berasal dari unsur kiai”¹³

Senada dengan penuturan Caswi, A. Munir Malik (Sekjed PKB), keberadaan kiai akan menjadikan *bargaining position* partai semakin tinggi di mata publik, terlebih di Kabupaten Batang yang masyarakatnya mayoritas muslim dan berlatar belakang NU.¹⁴ Keberadaannya akan menjadi daya tarik tersendiri. Munir mengatakan :

“Kalau kita melihat sejarah, PKB adalah partai yang didirikan oleh para sesepuh kiai NU. Mungkin *mainstream* yang terbentuk dalam umat PKB, PKB harus dipegang oleh kiai. Tidak ada aturan main dalam PKB dalam bursa pencalonan pimpinan partai yang mewajibkan harus berasal dari kiai atau gus, tetapi tidak salahnya jika ternyata kiai yang harus terpilih. Siapa saja yang dikehendaki oleh publik, mungkin itulah yang terbaik. Yang paling penting adalah dia paham tentang aturan main berorganisasi, sehingga partai akan

¹² Hasil wawancara dengan Caswiyono Rusydi, tanggal 21 Desember 2008

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hasil wawancara dengan A. Munir Malik, tanggal 24 Desember 2008

berjalan dengan baik. Perlu dicatat bahwa dalam PKB sosok kiai sangat penting”.¹⁵

Masruroh, Koordinator Persatuan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB DPC PKB) menuturkan bahwa dalam sebuah organisasi apapun tentunya menginginkan sosok pemimpin berwibawa dan *piawai* dalam berorganisasi. Sebagaimana dikatakan Mbak Oh (panggilan akrabnya) :¹⁶

“Menurut saya sosok pemimpin politik adalah paham tentang politik, mampu menjadi contoh, penyejuk dan penyemangat bagi bawahannya, bukan pemimpin yang otoriter. Fenomena di PKB, mungkin saja karena latar belakang pendirinya, atau karena yang *sreg* di hati publik adalah sosok kiai, karena ketinggian ilmu dan perilakunya. Bagi saya pemimpin partai itu boleh dari siapa saja, yang paling penting bagi saya adalah sosok pemimpin seperti yang saya katakan tadi, dan yang perlu dicatat mas ‘tidak diskriminatif terhadap perempuan’”.¹⁷

Demikian juga dengan penuturan Muhson (sekjen GPK DPC PPP), alasan kenapa lebih memilih kiai, karena dari sisi sejarah sudah jelas. PPP merupakan partai Islam, dan figur kiai menjadi sangat penting bagi partai berlambang ka’bah ini.¹⁸ Menurut penuturannya :

“Soal pilihan, hati nuranilah yang akan berbicara. Apa lagi soal pimpinan organisasi massa, harus hati-hati. Dalam PPP, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pimpinan partai, antara lain adalah kemampuan manajerial (organisasi), moralitas atau akhlak yang baik dan loyalitas terhadap partai. Jika persyaratan-persyaratan tersebut dimiliki oleh kiai, maka akan lebih baik kiai menjadi pimpinan partai. Tidak ada persyaratan pimpinan partai harus berasal dari kiai”.¹⁹

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Masruroh, tanggal 16 Desember 2008

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Muhson, tanggal 23 Desember 2008

¹⁹ *Ibid*

Berbeda dengan Suyono (Koordinator Bidang Politik DPC PPP), menurutnya tidak ada syarat pimpinan partai di PPP harus dari unsur kiai, tetapi karena warga PPP masih mengidamkan figur kiai, tidak heran ketika mereka lebih memilih kiai.²⁰ Lebih jauh dia mengatakan :

“Kalau soal pilihan, saya lebih memilih pimpinan partai dari kalangan politisi *an sich*. Posisi kiai di PPP lebih sebagai penyejuk hati partai, sebagai mediator dan resolusi konflik di internal partai. Berbicara tentang politik tidak bisa lepas dari kepentingan. Oleh karena itu, pemimpin partai harus berani dan cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Mohon maaf ni mas, biasanya kiai itu kurang berani, mungkin karena kehati-hatiannya atau memang ada persoalan lain. Tidak ada peraturan di PPP yang mensyaratkan pimpinan partai itu harus dari kiai. Adapun saat ini kenyataannya dipimpin oleh kiai, itu kan soal keputusan mayoritas”.²¹

Menurut Siti Maghfiroh, koordinator Wanita Persatuan DPC PPP mengatakan bahwa pimpinan partai bisa berasal dari kalangan manapun, termasuk perempuan.²² Dia mengatakan :

“Ketika berbicara soal pemimpin, yang perlu dicatat adalah kepawaiannya dalam manajemen, loyalitas, bukan status sosialnya. Status sosial penting, tapi bukan prioritas. Kalau berbicara tentang kiai sebagai pimpinan partai, menurut saya kiai yang sudah paham betul tentang manajemen organisasi dan politik. Kalau tidak paham kedua-keduanya, bagaimana nanti dalam menggerakkan roda partai. Kalau hanya sekedar besar status sosialnya dan tidak mempunyai kualitas kepemimpinan yang bagus, mustahil sebuah partai politik akan menjadi besar. Kecuali dipadukan antara pimpinan partai dengan *second line* di bawahnya”.²³

Disamping melakukan wawancara dengan sebagian pengurus partai, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat

²⁰ Hasil wawancara dengan Suyono, tanggal 22 Desember 2008

²¹ *Ibid*

²² Hasil wawancara dengan Maghfiroh, tanggal 26 Desember 2008

²³ *Ibid*

dan simpatisan partai. Diantaranya adalah K. Abdul Kholik (ketua MWC NU Limpung). Dia mengemukakan bahwa sebaiknya kiai itu tidak menjabat sebagai pimpinan partai, nanti bagaimana dengan santri dan umatnya. Umat nanti akan bingung harus berpijak pada siapa.²⁴ Lebih lanjut K. Abdul Kholik mengatakan :

“Dalam partai politik, sebaiknya kiai itu menjadi pengamat dan pengarah saja, lagi pula saya kasihan kalau kiai harus kehilangan kharismanya lantaran tidak bisa *memanaje* diri dan organisasi politiknya dengan baik. Politik itu tidak pandang bulu, yang ada hanya kepentingan. Tidak peduli dia kiai atau siapapun, siapapun akan dilibas demi kepentingan politik. Ini yang berbahaya. Saya juga pernah mengalaminya sendiri mas. Umat juga akan kebingungan, harus berpijak kepada siapa. Kiai A bilang begini, sementara kiai B bilang begitu, nanti kasihan pada pak kiainya, juga ummatnya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mahzum, simpatisan PPP dari Dlisen Limpung mengatakan bahwa sebaiknya pimpinan partai bukan dari kiai, dari kalangan politisi saja.²⁵ Menurut dia :

“Bagi saya siapapun berhak untuk menjadi pimpinan partai di PPP, yang terpenting adalah mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, sehingga roda organisasi akan berjalan dengan baik. Kiai, politisi atau siapapun bisa. Catatan ini mas, di PPP sangat membutuhkan figur kiai”.²⁶

Senada dengan Mahzum, Agus Setiawan (simpatisan partai dari desa Silurah Wonotunggal Batang) mengatakan bahwa partai politik itu sebaiknya tidak usah dipimpin oleh kiai. Dari nasionalis atau politisi murni saja, karena tingkat spekulasi dalam penentuan kebijakan partai lebih

²⁴ Hasil wawancara dengan K. Abdul Kholik, tanggal 27 Desember 2008

²⁵ Hasil wawancara dengan Mahzum, tanggal 21 Desember 2008

²⁶ *Ibid*

cepat, berbeda dengan kiai yang penuh dengan berbagai pertimbangan.²⁷

Dia mengatakan :

“Dengan kiai sebagai pemimpin, biasanya muncul rasa *ewuh-pakewuh* dalam diri kita ketika akan menyampaikan ide atau pendapat. Meskipun tidak semuanya kiai seperti itu. Dengan tokoh nasionalis atau politisi sebagai pimpinan partai, kita akan lebih leluasa menyampaikan ide dan gagasan kita”

Mohammad Anas (simpatisan PKB dari Tersono Batang)

mengemukakan :

“Di PKB atau partai apapun menurut saya tidak harus dipimpin oleh kiai, siapa saja bisa. Kalau melihat dari sejarah memang PKB didirikan oleh para kiai, bahkan dari struktur PBNU. Perlu diketahui, menjadi pemimpin bukan pekerjaan yang mudah, bahkan sangat tidak enak kalau tidak siap total, apalagi dalam politik mas. Bagi saya, kalau memang kiai atau siapapun mempunyai komitmen yang besar terhadap partai, sah-sah saja dipilih. Apalagi kalau dari unsur kiai yang mempunyai banyak jamaah, akan lebih baik”.²⁸

Sami Edi, simpatisan PKB asal Bawang mengemukakan :

“Pemimpin partai itu dari kalangan politisi saja, kiai sebaiknya kembali ke habitatnya, yakni pesantren dan umat. Tetapi jika ingin terjun dalam politik, kiai sebaiknya tidak memosisikan diri sebagai pimpinan partai, tetapi lebih sebagai penasehat saja”.²⁹

Sedangkan menurut Ahmad Khozin (simpatisan partai dari Plelen Gringsing) mengatakan bahwa dirinya setuju ketika kiai menjadi pimpinan partai, tetapi dengan catatan harus paham betul dengan organisasi dan tidak boleh maju dalam bursa legislatif.³⁰

²⁷ Hasil wawancara dengan Agus Setiawan, tanggal 15 Desember 2008

²⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Anas, tanggal 23 Desember 2008

²⁹ Hasil wawancara dengan Sami Edi, tanggal 21 Desember 2008

³⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Khozin, tanggal 30 Desember 2008

Dari sedikit pemaparan beberapa sumber di atas, dapat ditarik benang merah, antara lain adalah :

- a) Dari sisi sejarah, kedua partai tersebut tidak bisa lepas dari peran kiai atau ulama. Sehingga tidak heran ketika figur kiai masih menjadi idaman.
- b) Kiai merupakan tokoh sentral dalam masyarakat yang mempunyai santri, pangikut dan jamaah. Secara politis, akan cukup menguntungkan bagi kebesaran partai, terutama dalam mobilisasi massa.
- c) Terpilihnya kiai sebagai pimpinan partai karena pilihan hati publik yang lebih mengidamkan kiai atau figur kiai sangat dibutuhkan dalam kedua partai tersebut.
- d) Keilmuan dan moralitas kiai yang tinggi, sehingga keberadannya diharapkan mampu membawa iklim partai menjadi lebih bermoral dan beradab.
- e) Tidak ada aturan khusus dalam pola rekrutmen pemimpin partai, kenyataan kiai sebagai pimpinan kedua partai tersebut karena mungkin *mainstream* yang terbentuk di atas yang didasarkan dua sisi, sejarah dan politis.
- f) Siapapun bisa menjadi pemimpin partai, yang penting mengetahui tentang konsep-konsep dan manajemen organisasi.

- g) Ketika kiai tidak mampu memanje partai dan dirinya dengan baik, maka sebaiknya kiai tidak usah menjadi pimpinan partai. Kiai lebih baik diposisikan sebagai penehat atau penyejuk internal parati saja.

C. Peran Kiai Sebagai Pimpinan Partai Politik

Sebelum mendialogkan tentang peran strategis kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang, peneliti akan memulai dengan mengulas tentang konsep ‘peran’. Di dalam menjelaskan kiai dan politik, dapat digunakan sebuah konsep status dan peran. Makna peran, menurut Suhardono dapat dijelaskan melalui beberapa cara,³¹ *pertama* penjelasan historis, peran erat kaitannya dengan drama atau teater pada zaman Romawi. *Kedua*, menurut ilmu sosial. Peran berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika seseorang menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

Peran dalam sosiologi erat kaitannya dengan struktur sosial. Dalam struktur sosial, dikenal dua konsep penting yaitu status (*status*) dan peran (*role*).³² Menurut Ralp Linton, status adalah *a collection of right and duties* (suatu kumpulan hak dan kewajiban), sedangkan peran adalah *the dynamic aspect of status* (aspek dinamis dari suatu status). Menurut Linton seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tak terpisahkan dari status yang disandangnya.

³¹ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-1. 2007 hlm. 40

³² *Ibid*, hlm. 41

Dalam hal ini, peneliti akan membagi dalam dua aras, yaitu peran kiai dalam partai politik dan peran kiai dalam pemerintahan.

1. Peran Kiai dalam Partai Politik

Dalam kaitannya dengan peran strategis kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik adalah bagaimana kiai menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam sebuah partai politik. Diantara peran-peran strategis itu antara lain: peran strategis dalam menjalankan roda organisasi partai, peran strategis dalam proses pengambilan kebijakan dalam pemerintah yang berkaitan dengan urusan kenegaraan dan peran-peran sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya.³³

Bagaimana dengan peran strategis kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai di DPC PPP dan PKB Kabupaten Batang. Menurut Fauzi Fallas, keberadaan kiai sebagai pimpinan DPC PKB sangat efektif bagi kebesaran partai. Lebih lanjut dia menjelaskan :

“Apapun yang dikatan oleh kiai kepada pengikutnya, insyaallah akan selalu dipatuhi dan diikuti. Ini jelas sangat menguntungkan partai. Mungkin kepemimpinan dalam partai akan jauh berbeda dengan di pesantren yang lebih bersifat *patron-client* atau paternalistik. Tetapi setidaknya dengan pengalaman di organisasi kemasyarakatan, NU misalnya, kiai tidak begitu *demamakan* ketika menjadi pimpinan partai di PKB. Sebagai pimpinan partai di PKB, kiai tidak sekedar memerintah saja, tetapi juga banyak terlibat langsung di lapangan. Contohnya adalah aktif dalam pemenangan pemilu seperti melakukan sosialisasi dan kampanye. Pada Pemilu 2004, kita berada

³³ *Ibid*, hlm. 42

dalam posisi nomor dua setelah PDIP dan mampu menduduki 9 kursi di DPR. Ini juga bagian dari peran penting kiai mas.”³⁴

Menurut Caswiyono Rusydi, keberadaan kiai di PKB, terutama dalam struktur dewan syuro tidak begitu signifikan.³⁵ Dia mengatakan :

“Keberadaan dewan syuro dalam struktur DPC PKB dapat dikatakan cukup lemah, peran-perannyapun juga tidak begitu signifikan. Padahal dalam AD ART Partai, dewan syuro merupakan pimpinan tertinggi partai yang menjadi rujukan utama atas pedoman umum kebijakan-kebijakan utama partai pada tingkatannya. Entah karena kiai lebih berhati-hati atau memang kurang berani untuk mengambil sebuah keputusan, atau memang kurang paham terhadap pola kerja pimpinan dalam organisasi. ini yang juga menjadi PR bersama akan pentingnya manajemen organisasi. Adapun roda gerak partai berjalan sesuai dengan departemen yang ada, pimpinan parati lebih bersifat koordinatif”.³⁶

Menurut penuturan Munir Malik (sekjen DPC PKB Kabupaten Batang) mengemukakan bahwa keberadaan kiai, terlebih sebagai pimpinan partai politik sangat strategis bagi kemajuan partai. Lebih jelas dia mengatakan :

“Seperti yang saya sampaikan di atas bahwa secara politis, keberadaan kiai sangat menguntungkan partai, karena kiai mempunyai basis massa yang kuat. Peran-peran kiai yang cukup signifikan terlihat dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi partai dan kemenangan pemilu. Salah satu contohnya adalah menjadi juru kampanye partai. Untuk menggerakkan roda partai, kiai lebih banyak menjadi pengarah (*coordinator*) dan pengambil kebijakan. Pimpinan partai, dalam hal ini kiai, tidak memberikan pembatasan terhadap kreatifitas pengurus untuk menggerakkan roda partai, dengan memperbanyak volume kegiatan misalnya. Sehingga program-program organisasi berjalan dengan baik.”³⁷

³⁴ H. Fauzi Fallas, *Op. cit*

³⁵ Caswiyono Rusydi, *Op. cit*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Munir Malik, *Op. cit.*

Hal ini juga disampaikan oleh Maghfur, dia mengatakan :

“Agar roda gerak partai berjalan dengan efektif, buang rasa *ewuh pakewuh* ketika berbicara urusan partai. Saya tidak bisa menilai jauh, sepanjang yang saya tahu, peran strategis kiai dalam partai lebih sebagai penasehat dan penyemangat. Adapun penggerak roda partai, program kerja ada pada masing-masing bidang. Sehingga berbagai kebijakan partai seringkali diserahkan berdasarkan keputusan bersama, tidak selalu berada pada pimpinan partai, meski sepelik apapun”.³⁸

Tak jauh berbeda Munir, Suyono, menurutnya peran kiai yang cukup signifikan dalam partai adalah mobilisasi massa, karena punya basis massa yang kuat dan setia.³⁹ Lebih jelas, demikian penuturannya :

“Kiai kan tokoh masyarakat, punya santri dan jamaah yang banyak, sehingga apa yang dikatakan selalu menjadi panutan mereka. Begitu juga ketika kiai berada dalam partai tertentu, para pengikutnya insyallah akan selalu di-*sami'na wa atho'na-i*. Nah, hal inilah yang kemudian cukup menguntungkan partai. Namun demikian, kiai terkadang sangat lemah dan lambat dalam setiap pengambilan kebijakan partai. Padahal hal ini membutuhkan kecepatan. Entah karena kehati-hatiannya, atau memang memang ada persoalan lain. Untuk itu kami selalu melakukan koordinasi aktif antara pengurus dengan pimpinan partai, terutama terkait dengan program-program kerja partai. Sehingga kebijakan lebih banyak dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama. Pimpinan partai (kiai) tidak bersifat otoriter, meskipun punya otoritas yang besar. Dalam PPP, pola komunikasi sangat baik, tidak ada istilah *pakewuh ing pambudi*. Kiai juga cukup aktif dalam sosialisasi partai, terlebih menjelang pesta demokrasi. Salah satu peran paling menonjol kiai dalam PPP adalah menjadi mediator, dan penyejuk setiap ada konflik internal. Kalau kiai sudah turun tangan, konflik lebih cepat berakhir.”⁴⁰

³⁸ Hasil wawancara dengan Maghfur (salah satu ketua Katib DPC PKB Kabupaten Batang dari Bawang), tanggal 11 Desember 2008

³⁹ Suyono, *Op. cit*

⁴⁰ *Ibid*

Berbeda dengan Suyono, Muhson, menurutnya keberadaan kiai sebagai pimpinan partai sangat strategis bagi keberlangsungan partai. Dia mengatakan:

“Keberadaan kiai sebagai pimpinan partai akan membawa angin segar terhadap kebesaran partai, apa lagi PPP. Kalau tidak kiai seolah-olah ‘tidak’. Kiai dengan pengikutnya yang banyak dan setia, secara otomatis akan membawa kebesaran partai. Hal ini terbukti dengan perolehan suara pada Pemilu 2004 yang mencapai hingga 54.000 suara lebih dengan 7 kursi bertahan. Tentunya kita tidak bisa menafikkan peran serta kiai dalam hal ini. Untuk soal manajemen dan program kerja partai, sudah ada lembaga-lembaga tersendiri yang menanganinya”.⁴¹

Dari sedikit pemaparan di atas, ada beberapa catatan penting dalam kaitannya dengan peran strategis kiai dalam partai, diantaranya :

- a) Keberadaan kiai dalam partai secara umum lebih banyak sebagai penasehat dan mediator internal partai.
- b) Peran strategis kiai lebih banyak terkonsentrasi dalam kemenangan pemilu dan sosialisasi partai, terlibat dalam kampanye dan menjadi juru kampanye secara langsung misalnya.
- c) Tingkat manajemen organisasi kurang begitu signifikan, hal ini terjadi karena pengalaman kiai yang kurang begitu matang dalam organisasi.
- d) Program kerja partai berjalan sesuai dengan lembaga dan dengan masing-masing koordinator yang ada. Dalam kaitannya dengan

⁴¹ Muhson, *Op. cit*

pelaksanaan program kerja, kiai hanya menjadi koordinator dan tidak membatasi kreativitas dan ruang aktivitas partai.

- e) Koordinasi dan komunikasi yang aktif antara pimpinan dan pengurus partai menjadi media yang paling efektif untuk mensinergiskan peran masing-masing.

Bagaimana dengan tingkat pengaruh politik kiai di lingkungannya. Dalam hal ini, representasi yang digunakan oleh peneliti hasil perolehan suara Pemilu 2004 dan Pilgub 2008 pada masing-masing TPS tempat kiai tinggal.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari responden, Rasi'an misalnya, perolehan suara di TPS K.H. Nur Khozin dan K. Ahmad Soleh pada Pemilu 2004 suara terbanyak diperoleh PPP, sedangkan dalam Pilgub Jawa Tengah 2008 suara terbanyak dimenangkan oleh pasangan Tamsil-Rais.⁴²

Sedangkan di TPS tempat tinggal K. Muhtadi, Banyuputih, suara terbanyak dimenangkan oleh PKB, pada putaran Pilgub dimenangkan oleh pasangan Agus-Kholik yang diusung dai PKB.⁴³ Kemudian untuk perolehan suara di TPS Fathurrahman, Kalisalak Batang, angka tertinggi

⁴² Hasil wawancara dengan Rasi'an (Bau desa Dlisen Limpung), tanggal 10 Januari 2009

⁴³ Hasil wawancara dengan Sobirin (TU MTs Nurul Huda Banyuputih), tanggal 10 Januari 2009

diraih oleh PKB, begitu juga dengan perolehan pada Pilgub yang dimenangkan oleh pasangan Agus-Kholik dari PKB.⁴⁴

Namun demikian, untuk tingkat desa, baik di desa Dlisen, Banyuputih, maupun Plumbon, perolehan suara pada Pilgub 2008 semuanya dimenangkan oleh pasangan Bibit-Rustri dari PDIP.

Dari sedikit keterangan di atas, peran kiai cukup penting, terutama dalam perolehan suara. Adapun perolehan suara antara Pemilu 2004 dan Pilgub 2008 di tingkatan desa yang lebih banyak didominasi oleh pasangan Bibit-Rustri, bukan berarti bahwa peran dan pengaruh kiai tidak begitu efektif. Peneliti menilai karena ada beberapa hal, antara lain: perbedaan ideologi tertentu, perbedaan tingkat spekulasi Cagub-Cawagub terhadap pemilih dan keterlibatan pemerintah desa karena satu atap dengan bupati.

2. Peran Kiai dalam Pemerintahan

Sebagai tokoh sentral, keberadaan kiai juga cukup diperhitungkan dalam pemerintahan. Dalam kaitannya dengan peran kiai dalam pemerintahan, ada setidaknya ada beberapa indikasi yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah penegakan hukum, penekanan tingkat korupsi semakin rendah dan pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Saiful Huda (Mahasiswa Stain Asal Kalisalak Batang), tanggal 27 Desember 2008

Dalam kaitannya dengan peran kiai dalam aras pemerintah, peneliti cukup kesulitan untuk memperoleh informasi data dari responden. Hal ini disebabkan karena kesibukan para pejabat Pemda, terlebih dengan mekanisme protokoler yang cukup ribet, cukup menambah kerumitan pencarian data peneliti. Hanya beberapa responden yang kebetulan sempat bertemu dalam silaturahmi kepulauan haji di kediaman A. Taufiq, Wonotunggal. A. Taufiq, Kabagsos Kabupten Batang menuturkan :⁴⁵

“Dalam pengambilan kebijakan pemerintah, kiai juga dilibatkan, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Banyak usulan yang disampaikan, namun pada umumnya yang berkaitan dengan moralitas dan penyakit sosial di masyarakat Batang. Pengambilan kebijakan biasanya lebih sering dilakukan oleh dewan, melalui media penyerapan aspirasi (reses). Kemudian hasilnya didialogkan bersama dengan pemerintah. Kiai juga sering memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintahan bersih dari korupsi, dan harus berpihak kepada rakyat. Begini kata para kiai *‘ati-hati lho nek wani korupsi duite rakyat, bisa nggluludi’* (hati-hati kalau berani korupsi uang rakyat, bisa membahayakan diri sendiri”.

Demikian juga menurut penuturan Priodigdo, kepala Diknas Kabupaten Batang, mengatakan bahwa harus ada pemerataan antara pendidikan formal dengan non formal, seperti podok pesantren dan madin. Beliau juga menuturkan :

“Saya sempat bingung harus menjawab apa ketika ketemu kiai mas, hampir semua kiai mengungkapkan demikian *‘la mbok pemerintah kuwi iso nggatekno perkembangan pondok pesantren karo madin* (‘.....pemerintah itu bisa memperhatikan perkembangan pondok pesantren dan madin). Secara tidak langsung ini merupakan sentuhan dan usulan yang diperuntukan pemerintah daerah untuk bisa lebih bijak dalam persoalan pendidikan. Saya yang kebetulan membidangi

⁴⁵ Hasil wawancara dengan H. Taufiq, 3 Januari 2009

itu, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkannya dengan baik mas.”⁴⁶

Nasrudin, salah satu pejabat Bappeda Kabupaten Batang, pihaknya mengatakan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah selalu mengajak lapisan masyarakat, termasuk kiai. Terutama melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Munrenbang), baik di tingkat desa (Murenbangdes) dan Kecamatan (Murenbangcam).⁴⁷

Menurut penuturannya:

“Dalam kaitannya dengan peran serta kiai dalam pengambilan kebijakan, kiai lebih banyak dilibatkan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Diantara usulan yang sering muncul adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan pesantren, madin dan kesejahteraan ustadz dan organisasi kemasyarakatan. Kiai juga banyak menyinggung tentang maraknya penyakit masyarakat, judi, lokalisasi, miras dan lain sebagainya yang harus segera ditangani. Salah satu usulan yang nampaknya berawal dari para kiai ini kemudian disampaikan melalui Fraksi PPP dengan mengusulkan adanya Perda Miras. Namun demikian, hal ini gagal di tingkat dewan, entah karena persoalan apa.”

Peneliti juga sempat melakukan bincang-bincang dengan salah satu Pembinaan Rohani dan Mental (Rohbintal) Polsek Bawang, Ngadiman.⁴⁸

Dia menuturkan :

“Kami mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyakit masyarakat, seperti narkoba, judi, miras dan tindakan kriminal lainnya. Termasuk mengajak para kiai untuk sesering mungkin memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat terhadap dampak dari penyakit-penyakit di atas, terhadap diri sendiri dan orang lain. Nasehat kiai insyallah akan lebih dipercaya di masyarakat. Sosialisasi ini kami sampaikan terutama dalam setiap

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pridigdo, 3 Januari 2008

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Nasrudin, tanggal 10 Januari 2009 bertepatan dengan Khaul Syaikh Maualna Magribi Wonobodro Batang.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ngadiman, 27 Desember 2008

ada kegiatan masyarakat yang melibatkan pihak Polsek untuk berpartisipasi.”

Menurut Umar Abdul Jabar (ketua Lakpesdam NU Batang), mengatakan bahwa peranan kiai dalam pemerintah hanya sebagai pemantau saja.⁴⁹ Lebih jelas, dia mengatakan :

“Dalam pembuatan kebijakan, berbagai lapisan masyarakat di undang, mulai dari LSM, Ormas, OKP dan tokoh agama dan masyarakat diundang. Sepanjang yang pernah saya ikuti, saya lihat kiai tidak begitu respon dan nampak tidak begitu aktif proses pembuatan kebijakan. Dalam Musrenbang juga sama, kiai lebih banyak menerima matang dari pada harus larut dalam perdebatan panjang. Justru masyarakat umum lebih banyak yang terlibat. Kiai lebih banyak menjadi pemantau, meskipun secara tidak langsung”.

Dari hasil penuturan yang ada, nampaknya keterlibatan kiai tidak terlalu jauh, hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, seperti penanggulangan masalah kenakalan remaja, judi, bahaya narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Peran itupun hanya terbatas pada peranan moral dalam bentuk memberikan nasehat-nasehat (sosialisasi) kepada masyarakat akan besarnya dampak negatif dari aktivitas terlarang tersebut.

Dalam dunia pendidikan, kiai juga mempunyai kontribusi yang cukup positif, meskipun bukan dalam kapasitas formal. Hal ini tercermin dalam perhatian pemerintah terhadap madin dan kesejahteraan gurunya, meskipun hanya sebatas bantuan kecil. Kiai tidak banyak terlibat dalam pembuatn kebijakan dalam pemerintah.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Umar Abdul Jabar, tanggal 4 Januari 2009

D. Implikasi Keterlibatan Kiai dalam Politik

Keterlibatan kiai politik tentunya membawa implikasi, baik politik maupun sosial. Implikasi ini bisa berupa positif, juga negatif. Dalam aras partai politik dan pemerintahan, seperti yang peneliti kemukakan di atas. Selain itu, keberadaannya dalam politik juga cukup memberikan kontribusi bagi pendidikan politik masyarakat (*civic education*), meskipun tidak dalam kapasitas formal. Terbukti dengan banyaknya partisipasi politik masyarakat, terutama masyarakat yang berkiblat pada pilihan politik kiai. Sebagai pimpinan partai dan sekaligus pimpinan pondok pesantren kiai juga tidak jarang memberikan informasi tentang pentingnya politik dan perkembangannya kepada santri dan masyarakat.

M. Tausirul Murod, salah satu santri di pondok pesantren Roudlotul Muhtadin yang berasal dari desa Amongrogo Limpung berpendapat :

“Politik sangat berbahaya bagi yang tidak bisa menggunakannya. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan politik antara kiai dan para ustadz, saya bisa belajar ilmu politik dari mereka. Menurut saya perbedaan diantara mereka itu wajar karena manusia memang mempunyai perbedaan. Sebenarnya saya kurang begitu setuju dengan para kiai dan ustadz yang terjun dalam dunia politik karena sangat mengganggu belajar saya. Kadang-kadang gara-gara Pak kiai ikut politik, belajar mengajinya diliburkan”.⁵⁰

Istiqomah, santriwati Ponpes Darul Ma’arif asal Proyonanggan Batang ini mengemukakan :

“Perbedaan politik antara kiai dan para ustadz tidak perlu dipermasalahkan. Asalkan tidak melanggar ajaran agama dan tidak menimbulkan permusuhan. Malah para santri merasa senang dengan adanya perbedaan politik tersebut. Hal itu akan membantu para santri untuk lebih dewasa dan menambah pengetahuan mengenai situasi politik

⁵⁰ Hasil wawancara dengan M. Tausirul Murod, tanggal 10 Desember 2008

yang sedang berkembang. Namun sayangnya ketika pak kiai keluar masuk mengadakan koordinasi politik, biasanya mengajinya diliburkan. Ini yang membuat saya kecewa. Kalau tidak diliburkan, biasanya ada penggantinya meskipun dalam mengajar keterangan-keterangannya tidak sejelas pak kiai”.⁵¹

Berbeda dengan Istiqomah, Khanif, santriwan ponpes Roudlotul

Muhtadin asal Bawang ini mengemukakan bahwa :

“Seharusnya keduanya mempunyai pilihan politik yang sama agar para santri tidak bingung memilih partai politik. Namun menurutnya semua pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah para santri banyak memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga mengenai pandangan politik mereka. Sehingga para santri tidak kalah pandainya dengan para lulusan akademis dalam masalah politik. Mengenai pembelajaran, Khanif merasa kecewa ketika belajar mengajinya libur karena aktifitas politik kiai tersebut”.⁵²

Menurut penuturan Ali Murtadlo, asal Kaliboyo Tulis,⁵³ dia mengatakan:

“Ketika event-event politik mulai digelar, para kiai tidak jarang mengajak kepada kita untuk tidak golput. Alaannya adalah kita mempunyai hak untuk memilih dan menentukan pemimpin dan wakil kita dalam pemerintah. Politik itu tidak selamanya kotor, itu tergantung kepada kita semua. Rasulullah juga berpolitik. Dengan berpolitik, kita juga menyampaikan aspirasi kita, karena kita tidak mungkin terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, dan salah satu media adalah melalui politik. agar kita tidak dibohongi oleh kepentingan politik, kita harus tahu politik.”

Dari sedikit pemaparan di atas, dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa keberadaan kiai juga cukup memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan politik masyarakat, meskipun dalam kapasitas mengajak untuk tidak golput, dan lebih menekankan untuk memanfaatkan hak pilih kita dalam politik. Entah itu merupakan bagian dari strategi politik kiai untuk memperoleh simpati masyarakat atau memang demikian. Kiai tidak

⁵¹ Hasil wawancara dengan Istiqomah, tanggal 15 Desember 2008

⁵² Hasil wawancara dengan Khanif, tanggal 13 Desember 2008

⁵³ Hasil wawancara dengan Ali Murtadlo, tanggal 26 Desember 2008

memaksakan kehendak ustadz dan santri untuk berkiblat pada pilihan politiknya.

Namun demikian, keterlibatannya juga membawa dampak yang negative bagi proses pembelajaran di pesantren, terutama ketika even-event politik berlangsung. Kiai lebih banyak melakukan aktivitas politiknya di luar, sementara untuk pembelajaran di pesantren sering libur atau diwakilkan dengan ustadz atau santri senior.

Bagaimana dengan implikasi terhadap aspek sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penuturan Sami Edi :

“Sepanjang yang saya tahu, salah satu kontribusi positif kiai dalam masyarakat adalah memberikan pengetahuan keagamaan, seperti mengajar dan memberikan nasihat-nasihat keagamaan melalui majlis-majlis ta’lim. Untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira belum ada ya. Entah karena saya kurang tahu atau memang belum ada. Yang saya lihat, kiai yang terlibat dalam politik, keadaan pondok akan berbeda dengan kiai yang hanya diam dan konsentrasi ngurusi umat saja. Terutama dalam pembangunan pesantren ”.⁵⁴

Demikian juga menurut penuturan Mufid, asal Klawen Bawang.⁵⁵ Dia mengatakan :

“Sebetulnya saya takut untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi sepanjang yang saya rasakan, saya belum pernah merasakan kesejahteraan dari kiai, malah justru yang saya rasakan secara langsung dari orang yang kaya (ghoni) di kampung kami. Kalau pondok dapat bantuan masyarakat pun banyak yang tidak tahu dari mana bantaun itu berasal, tapi berdasarkan yang saya tahu pondok sering dapat bantaun untuk sarana dan prasarana pesantren”.

⁵⁴ Sami Edi, *Op. Cit*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Mufid, tanggal 4 Januari 2009

Menurut penuturan Teguh Abadi, (ketua IPNU kecamatan Kandeman)⁵⁶

mengatakan :

“Saya kurang tahu persis itu mas, kesejahteraan yang anda maksud, tetapi secara ekonomi tidak banyak bahkan tidak ada. Kiai lebih banyak memberikan *mauidloh hasanah* dan menjadi pendidik di kampung kami. Dan jarang sekali menyinggung masalah ekonomi, apa lagi tentang kesejahteraan masyarakat.”

Hal senada juga disampaikan Amin, aktivis muda NU asal Wonosegoro Bandar.⁵⁷ Menurut penuturannya :

“Menurut saya, tidak banyak yang diberikan kiai kepada masyarakat, terlebih ketika membicarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk ekonomi, yang saya tahu kiai itu ya lebih banyak terkonsentrasi pada pengayaan spiritual umat, memberikan pendidikan kepada masyarakat saja. Untuk masalah ekonomi kerakyatan, itu merupakan tugas pemerintah. Dan saya kira kiai juga tidak terlibat jauh di dalamnya”.

Dari sedikit pemaparan di atas dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, kiai tidak banyak memberikan kontribusi. Peran kiai dalam masyarakat lebih banyak terkonsentrasi pada penguatan spiritual dan pendidikan keagamaan masyarakat, melalui media ceramah dan pendidikan keagamaan di pesantren, madrasah atau masjid. Untuk masalah ekonomi kerakyatan, jarang sekali disinggung.

Ada perbedaan yang mendasar antara kiai yang berpolitik dengan yang tidak. Terutama dalam perkembangan pesantren, baik itu berupa sarana dan prasana maupun bentuk pembangunan yang lain. Kiai yang aktif dalam politik, biasanya tingkat perkembangan fisik pesantrennya akan lebih cepat. Bahkan bantuan banyak mengalir di dalamnya.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Teguh Abadi, tanggal 27 Desember 2008

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Amin, tanggal 27 Desember 2008

BAB IV

EFEKTIVITAS PERAN KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK DAN IMPLIKASINYA

Sebelum menganalisa terhadap efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang, peneliti terlebih dahulu akan mengulas tentang ‘konsep efektivitas’.

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*.¹

Menurut Chester I. Barnard dalam *Kebijakan Kinerja Karyawan* (Prawirosentono, 1999 : h.27), menjelaskan bahwa arti efektif adalah sebagai berikut : “*When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective.* (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif).²

Menurut Stephen P. Robinson dan Mary Coulter efektivitas sering digambarkan sebagai “melakukan pekerjaan yang benar” yaitu aktivitas-aktivitas kerja yang membantu organisasi mencapai sasaran.³

¹ Idy Muzayyad, *Makalah Perilaku Kepemimpinan Yang Efektif*, disampaikan dalam Latihan Kader Utama (Lakut) PW IPNU Jawa Tengah di pondok pesantren Edi Mancoro, 23-25 Oktober 2006, hlm. 1

² Pendapat Chester I. Barnard dalam Idy Muzayyad, *Ibid.* hlm. 2

³ Stephen P. Robinson/ Mary Coulter, *Manajemen*, Jakarta: Indeks, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 8

Efektifitas dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) Iyang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*).⁴

Secara teoritis, kepemimpinan akan berjalan efektif, disegani, dan memiliki derajat yang tinggi apabila seorang pemimpin memiliki tiga kelebihan dari yang dipimpin. *Pertama*, bidang rasio/intelektual yang meliputi pengetahuan tentang tujuan, asas-asas dan strategi memutar roda organisasi dan tercapainya tujuan organisasi secara maksimal. *Kedua*, bidang rohaniah yang meliputi keluhuran budi pekerti, ketinggian moralitas, dan kesederhanaan watak. *Ketiga*, bidang jasmaniah yang meliputi memiliki badan/fisik yang sehat dan memungkinkan menjadi contoh dalam prestasi sehari-hari.⁵

Efektivitas kepemimpinan dipengaruhi juga oleh metode mengarahkan bawahan yang digunakan oleh seorang pemimpin agar mereka melakukan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab senantiasa berbeda pada setiap situasi dan kondisi.⁶ Adapun titik tekan dalam pengelolaan organisasi/partai adalah lebih pada masalah manajemen organisasi dan perencanaan *strategi-taktik*.

Dalam kaitannya dengan analisis terhadap efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik di Kabupaten Batang, peneliti akan memulainya dari pola keterlibatan kiai dalam politik praktis.

⁴ Idy Muzayyad, *Ibid*, hlm. 2

⁵ A. Muhaimin Iskandar, *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Social di Tingkat Basis: Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta : DPP PKB, 2000. hlm 32

⁶ *Ibid*, hlm. 33

A. Pola Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis

Di dalam masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Karen itulah, tidak mengherankan jika kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Diskursus seputar peran sosial politik kiai dalam sosial politik di Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kiai dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dalam menetapkan figur kepemimpinan informal, khususnya kiai.

Bersamaan dengan itu, masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kiai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber 'fatwa' terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di

antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sehingga apapun yang bermuara dari kiai akan selalu diikuti dan selalu *disami'na wa atho'nai*.

1. Latar belakang keterlibatan kiai dalam politik

Mengapa kiai termotivasi untuk terjun dalam politik praktis. Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Ahmad Patoni, ada beberapa alasan mendasar yang mempengaruhi seorang kiai terlibat dalam politik praktis. *Pertama*, alasan teologis, dalam perspektif ini, hubungan antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*) dalam tradisi *sunni* pada dasarnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi.⁷ *Kedua*, alasan dawah. Da'wah merupakan usaha sosialisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui jalur politik. *Ketiga*, alasan solidaritas politik yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai mau tidak mau harus terjun ke dalamnya.

Sedangkan menurut teori yang ditawarkan oleh Khoiru Ummatin, ada faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis. *Pertama*, faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. *Kedua*, faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. *Ketiga*, faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk

⁷ *Ibid*, hlm. 153

penundang-undangan. Dan *keempat*, budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik

Berdasarkan data yang di lapangan, jika merujuk pada klasifikasi yang ditawarkan oleh Ahmad Patoni, keterlibatan kiai dalam politik di Kabupaten Batang didasarkan pada ketiga alasan tersebut, yaitu alasan teologis yang menyatakan bahwa politik juga diatur dalam Islam (*din wa daulah*) dengan berlandaskan pada konsep *Ta'adul* (keadilan), *Tawasul* (perantara), *Tawazun* (pertimbangan), *Tasamuh* (rasa toleransi), dan *amr ma'ruf nahi munkar* (menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran).

Alasan kedua adalah alasan dakwah, hal ini tercermin dari beberapa penuturan yang menyatakan bahwa 'dengan kita terjun dalam politik, setidaknya akan tercipta penegakan hukum (*tanfidzul hukmi*) dan nilai-nilai Islam terejawantahkan di dalamnya. Sehingga politik tidak hanya diorientasikan untuk kepentingan individu, akan tetapi lebih pada kemaslahatan umat (*maslahat al amah*).

Ketiga adalah alasan solidaritas politik yang tidak bisa hindari. Hal ini tercermin dalam beberapa penuturan yang menyatakan bahwa 'politik adalah media perjuangan umat'. Alasan lain yang berkaitan adalah adanya sinergisitas nilai-nilai perjuangan dengan organisasi kemasyarakatan tertentu.

Jika didasarkan pada klasifikasi yang ditawarkan oleh Khoiru Ummatin, peneliti melihat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis. *Pertama*, faktor kekuasaan. Meskipun dari hasil penelusuran yang ada, para elit agama ini tidak menyatakan secara langsung bahwa keterlibatan mereka dalam politik tidak berorientasi pada kekuasaan, namun pada kenyataannya mereka bersedia menjabat sebagai pimpinan partai politik, baik di PPP maupun PKB.

Kedua, faktor kepentingan. Peneliti melihat ada perbedaan yang mendasar antara kiai yang terlibat dalam politik dengan yang hanya terkonsentrasi pada umat secara *an sich*. Akses dan jaringan serta akselerasi perkembangan pesantren bagi kiai yang berpolitik jauh lebih cepat dibandingkan kiai yang apatis dengan politik. *Ketiga*, faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk penundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kebijakan pemerintah yang sudah mulai memberikan pemerataan antara pendidikan formal dan non formal, termasuk pesantren.

Keempat, budaya politik. Dalam kalangan kiai NU, peneliti melihat bahwa persinggungan kiai dengan politik merupakan bagian dari budaya politik yang dimiliki oleh hampir setiap individu.

2. Kiai sebagai pimpinan partai politik

Dalam kaitannya dengan kiai sebagai pimpinan partai politik, peneliti banyak menemukan data-data penting ‘mengapa kiai menjadi figur yang diprioritaskan untuk menjadi pimpinan partai di DPC PPP dan PKB Kabupaten Batang. Secara umum ada dua sisi yang harus dicermati. *Pertama*, dari sisi sejarah, kedua partai tersebut merupakan partai politik yang pendirinya dibidani oleh para kiai atau ulama. *Kedua*, dari sisi politis, kiai merupakan tokoh sentral dalam masyarakat yang mempunyai basis massa yang banyak, santri, jamaah yang setia kepada kiai. Apapun kiblat kiai, biasanya akan selalu mereka ikuti, termasuk dalam pilihan politik. Oleh karena itu, secara politis keberadaan mereka akan sangat menguntungkan bagi kebesaran partai, terutama dalam *pendulang* suara (*foat getter*) partai.

Selain kedua alasan di atas, peneliti melihat ada faktor-faktor lain, yaitu moralitas, intelektualitas dan manajerial (meskipun kurang begitu matang) sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Muhaimin Iskandar. Demikian juga dengan tesis Munawir Sjadzali, yang menyatakan bahwa agar ulama dapat berperan sesuai dengan perkembangan zaman, perlu memiliki tiga hal, yaitu memiliki komitmen hanya dengan Islam, integritas ilmunya tidak diragukan dan loyalitasnya kepada umat. Demikian juga dengan kiai, sehingga menjadi bagian dari alasan mengapa mereka diprioritaskan sebagai pimpinan partai.

Namun demikian, ketika membicarakan pilihan pemimpin partai secara individu, beberapa responden lebih menghendaki bukan dari unsur kiai, tetapi dari unsur politisi. Beberapa alasan mendasar mereka adalah kiai merupakan panutan dan pembimbing umat dan akselerasi pengambilan kebijakan kiai cenderung lebih lambat karena kehati-hatiannya (dan pola manajemen organisasi yang kurang matang).

Mendialogkan tentang kriteria pemimpin, dalam perspektif Islam disebutkan adanya empat sifat/karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah saw. yakni *sidiq* (benar, jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (komunikator), dan *fathanah* (cerdas). Meskipun sifat-sifat tersebut bersifat abstrak, peneliti melihat ada dua sifat yang sangat berkaitan dengan beberapa penuturan responden, yaitu *tabligh*, seperti pola komunikasi yang aktif antara kiai sebagai pimpinan partai dengan jajaran kepengurusan di bawahnya tanpa mengenal rasa *ewuh ing pambudi*. Sifat yang kedua adalah *fathonah*, cerdas dalam ilmu agama misalnya.

Beberapa persyaratan yang berkaitan antara lain adalah pendapat Imam Al-Mawardi yang membagi dalam tujuh syarat, yaitu keadilan (*al-'adalah*), memiliki pengetahuan, sehat indranya, sehat anggota badannya dari berbagai kekurangan, kreatif dalam mengatur rakyat dan mengupayakan kebaikan, memiliki keberanian dan keteguhan, dan nasab Quraisy.

Sedangkan menurut Ibnu Rabi' mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kebapaan dan berasal dari keluarga raja, bercita-cita besar, berpandangan kokoh, tangguh dalam menghadapi kesukaran, memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan negara dan pemeratakan keadilan, dan memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah orang yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-quwwat*) dan integritas (*al-amanat*).

Dari data yang diperoleh di lapangan, dalam pola rekrutmen pimpinan partai baik di PPP maupun PKB tidak ada syarat yang mewajibkan pimpinan partai harus berasal dari unsur kiai atau gus. Dari beberapa kriteria di atas, berdasarkan ketujuh syarat yang ditawarkan Imam Al-Mawardi, ada beberapa kriteria yang sesuai dengan data di lapangan, antara lain adalah memiliki pengetahuan, sehat indranya, sehat anggota badannya, kreatif dan memiliki keberanian serta keteguhan. Sedangkan syarat yang pertama 'bersifat adil', peneliti tidak dapat memasukkannya, karena menurut peneliti sifat tersebut sangat bersifat subjektif dan abstrak serta sulit untuk mengkategorikannya.

Jika merujuk pada Ibnu Rabi', peneliti melihat beberapa yang relevan dengan kepemimpinan kiai, antara lain kebapaan dan berasal dari

keluarga raja,⁸ bercita-cita besar dan berpandangan kokoh, serta memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi, para ustadz dan santri serta jamaah, baik yang dilibatkan dalam politik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara, jika melihat kualifikasi yang dikonsepsikan oleh Ibnu Taimiyah, kiai juga cukup layak untuk menjabat sebagai pimpinan partai politik, hal ini didasarkan pada kekuatan (*al-quwwat*), baik secara moralitas, mobilitas maupun intelektualitas, dan integritas (*al-amanat*) meskipun tidak dapat diraba secara kasap mata. Adapun bentuk kepemimpinan kiai, menurut peneliti kiai lebih mirip dengan *amir*, seperti sebutan yang diperuntukkan kepada Umar bin Khotob.

Akbar Tanjung dalam tulisannya juga memberikan beberapa konsep yang berkaitan dengan kriteria seorang pemimpin modern, antara lain adalah memiliki ide-ide besar yang visioner dan menjadi referensi utama bagi yang dipimpin, memiliki kemampuan (*ability*) dan kapasitas (*capacity*) antara lain: keahlian/kecakapan (*skill*) dalam berkomunikasi, memotivasi, dan yang lainnya. Dari data yang diperoleh di lapangan, peneliti melihat bahwa sebagian besar pemimpin partai (kiai) memiliki kriteria yang dikonsepsikan oleh Akbar Tanjung di atas.

⁸ Menurut peneliti, keluarga raja dalam konteks (Indonesia) saat ini adalah keluarga yang berbau priyayi. Dalam masyarakat pedesaan Jawa, khususnya kultur Kabupaten Batang keluarga priyayi terdiri atas, pejabat, guru dan kiai (serta keturunannya).

3. Pola keterlibatan dan tipologi kiai dalam politik

Dalam kaitannya dengan wujud keterlibatan kiai dalam partai politik, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan teori Pradjarta Dirdjosanjoto sebagai berikut⁹:

a) Sebagai pengurus struktural partai politik

Keterlibatan kiai tidak hanya sebagai anggota biasa, tetapi sekaligus menjabat sebagai pengurus partai politik baik di tingkat lokal, wilayah, maupun nasional.

b) Sebagai anggota legislatif dan eksekutif

Keterlibatannya tidak hanya sebagai pengurus partai, tetapi dari mereka juga ada yang sekaligus menjabat sebagai anggota legislatif.

c) Dukungan suara dan kampanye

Wujud dukungan suara yang diberikan oleh kiai biasanya diberikan kepada calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penemuan di lapangan memperlihatkan bahwa K.H. Ahmad Nur Khozin, K.H. Ahmad Sholeh Ma'sum, dan K. Muhtadi dan Gus Rohman masuk dalam klasifikasi yang pertama, yaitu sebagai pengurus struktural partai. Sementara pada klasifikasi wujud keterlibatan kiai yang kedua hanya dimiliki oleh Fathurrahman. Selain sebagai pimpinan partai,

⁹Baca dalam Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Di Jawa*, (Jogjakarta, LKiS, 1999), hlm. 216-233. Lihat pula dalam Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 158-163.

ia juga menjabat sebagai anggota legislatif (DPRD II Kabupaten Batang periode 2004-2009).

Sementara, wujud keterlibatan kiai dalam klasifikasi yang ketiga dapat dilihat dalam aktivitasnya sebagai juru kampanye partai, terutama ketika *event-event* politik digelar. Kiai juga banyak terlibat dalam suksesi kepemimpinan, baik dalam skala lokal maupun nasional, seperti dalam Pilkada, Pilgub, Pilpres maupun Pileg.

Selain sebagai pimpinan partai di DPC PPP dan PKB Kabupaten Batang dan pengasuh pondok pesantren, mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan dan berbagai kegiatan lain. Tugas dan peran kiai inilah yang kemudian menyebabkan mereka melakukan peran ganda.

Dalam kaitannya dengan tipologi kiai, peneliti mengacu pada beberapa klasifikasi yang ditawarkan. Ahmad Fauzan dalam tesisnya dan Endang Turmudi dalam disertasinya, tampaknya cukup mewakili tipologi kiai. Menurut Fauzan, kiai digolongkan menjadi lima, yaitu kiai langgar, kiai pesantren, kiai mubaligh, kiai politik dan kiai madrasah. Sedangkan Endang Turmudi mengklasifikasikan kiai menjadi empat, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung.

Apabila pedomannya adalah pengelompokan yang ditawarkan oleh Ahmad Fauzan, maka K.H. Ahmad Nur Khozin, K.H. Ahmad Sholeh Ma'sum, dan K. Muhtadi termasuk ke dalam empat golongan, yaitu kiai pesantren, kiai mubaligh, kiai politik dan kiai madrasah. Karena di samping mereka sebagai pengasuh atau pemimpin pesantren, mereka juga

aktif dalam kegiatan ceramah, politik dan pembelajaran di madrasah. Sedangkan apabila merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Endang Turmudi, mereka bisa masuk ke dalam empat kategori, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung. Karena mereka di samping mengasuh pondok pesantren, juga aktif dalam kegiatan tarekat, politik, dan ceramah ke berbagai daerah.

Sementara Fathurrahman, menurut klasifikasi Ahmad Fauzan, menempati posisi kiai mubaligh dan kiai politik. Sedangkan berdasarkan teori Endang Turmudi, Fathurrahman menempati posisi sebagai kiai politik dan kiai panggung.

Adapun tipe kepemimpinan, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Muhamimin Iskandar, setidaknya ada tiga tipe atau gaya kepemimpinan, yaitu tipe otoriter/direktif, tipe konsultatif dan tipe partisipatif. Peneliti menilai kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai di Kabupaten Batang termasuk dalam tipe kepemimpinan kedua dan ketiga, yaitu tipe partisipatif dan konsultatif. Meskipun terkadang tipologi yang pertama (otoriter/direktif) muncul, tetapi hanya sebatas penegas saja. Hal ini dapat peneliti saksikan dalam sebuah rapat yang dilaksanakan oleh DPC PKB, di mana kiai cukup mempunyai hak preoregatif dalam menentukan sebuah kebijakan bersama. Demikian juga dengan PPP. Otoriter di sini bukan berarti otoriter sebagaimana umumnya, tetapi lebih menunjukkan pada sebuah ketegasan bersikap.

B. Efektivitas Peran Politik Kiai dan Implikasinya

1. Efektivitas Peran Politik Kiai

Untuk memudahkan analisis terhadap efektivitas peran kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik, peneliti mencoba mensinergiskan dengan beberapa teori yang telah dikemukakan di atas. Menurut Chester I. Barnard dijelaskan bahwa arti efektif adalah apabila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai. Sedangkan menurut Stephen P. Robinson dan Mary Coulter mengemukakan bahwa efektivitas digambarkan dengan melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan apabila dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) adalah mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan dan sangat menentukan.

Setidaknya ada dua dimensi atau indikator yang menjadi rujukan dalam kaitannya dengan efektivitas peran kepemimpinan kiai dalam politik, yaitu peran kiai dalam partai politik, pemerintahan dan masyarakat. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, muncul beragam persepsi.

Pertama, peran kepemimpinan kiai dalam aras partai politik cukup efektif dalam beberapa hal, yaitu sebagai pembina dan mediator internal partai, sebagai pendulang suara (*foate getter*) dan mobilisasi massa serta sangata strategis dalam sosialisasi dan kampanye partai, terutama melalui media keagamaan kiai, seperti dalam pengajian maupun rutinitas yang

lain. kepemimpinan kiai dalam partai politik juga cenderung bersifat kooperatif dan tidak otoriter.

Sedangkan kepemimpinan kiai kurang efektif dalam beberapa hal, antara lain adalah lambat dalam pengambilan kebijakan partai, manajemen organisasi yang kurang matang dan peranannya tidak begitu signifikan, lebih banyak sebagai penasehat dan pembina partai.

Sementara peranannya dalam aras pemerintahan, keberadaan kiai cukup efektif sebagai pemantau pemerintah, peranannya lebih banyak terkonsentrasi dalam peranan moral dan sosial dalam bentuk memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat akan pentingnya harmonisasi sosial. Kiai juga banyak memberikan kontribusi dalam pendidikan politik kepada masyarakat (*civic education*). Namun demikian, peranan kiai dapat dikatakan tidak efektif dalam aras pemerintahan dalam pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan minimnya pemahaman terhadap mekanisme pembuatan kebijakan dan realitas sosial yang ada, sehingga kiai lebih banyak sebagai pendengar setia dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah.

Peranan yang lain yang cukup membantu pemerintah adalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, seperti masalah kenakalan remaja, judi, bahaya narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Peran itupun hanya terbatas pada peranan moral dalam bentuk pemberian nasehat-nasehat (sosialisasi) kepada masyarakat dan lebih merupakan upaya preventif.

Dalam dunia pendidikan, kiai juga mempunyai kontribusi yang cukup positif, meskipun bukan dalam kapasitas formal. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan keberadaan madin dan kesejahteraan ustadznya.

2. Implikasi Keterlibatan Kiai dalam Politik

Keterlibatan kiai dalam politik ternyata membawa dampak, baik positif maupun negatif terhadap aspek sosial. Diantara aspek positif yang peneliti temukan di lapangan antara lain adalah mampu menjadi media bagi pendidikan politik dan media informasi tentang politik dan perkembangannya, terutama kepada santri dan masyarakat. Implikasi yang nyata dari persinggungannya dalam politik adalah sangat efektif bagi penguatan akses dan jaringan pesantren. Sehingga akselerasi perkembangan pesantren dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana relatif lebih cepat.

Namun demikian, keberadaan kiai dalam politik belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam masyarakat. Beberapa poin penting peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden, diantaranya adalah menyatakan bahwa kiai belum mampu memberikan kontribusi positif, terutama bagi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Meskipun berpolitik yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat banyak, hal ini nyaris disinggung oleh kiai. Lebih banyak terkonsentrasi dalam bidang pendidikan keagamaan saja.

Peran ganda kiai, sebagai pimpinan partai sekaligus pesantren ternyata tidak menjadikan disharmonisasi pesantren, terutama dalam pola komunikasi. Pola komunikasi antara kiai, ustadz dan santri berjalan dengan harmonis, terbukti dengan tidak adanya paksaan untuk selalu sejalan dengan kiblat politik kiai. Kiai hanya memberikan pandangan-pandangan politik yang aktual kepada para santri. Sehingga mereka dapat memperoleh ilmu dan pengalaman dari para kiai dan ustadznya dalam hal politik.

Namun demikian, cukup memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan proses pembelajaran di pesantren. Diantaranya adalah santri merasa kecewa terhadap proses pembelajaran yang sering diliburkan, sehingga mengakibatkan menurunnya daya tarik santri terhadap minat belajar. Kesibukan kiai dalam politik ternyata cukup menjadikan berkurangnya perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar, tidak heran jika kemudian banyak santri yang kemudian lebih memilih mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan ekstra kulikuler misalnya.

Kegiatan belajar juga sering diwakilkan kepada ustadz lantaran frekuensi aktivitas politik kiai yang lebih banyak dilakukan di luar. Akibatnya adalah para santri merasa kurang nyaman ketika diajar oleh ustadz atau santri senior yang ditunjuk kiai untuk mengantinya. Bahkan ada yang memilih pulang kampung daripada tinggal di pondok pesantren

akibat dari kesibukan para pendidik dalam politik praktis. Hal ini secara otomatis akan berdampak pada kurikulum pesantren.

Dari gambaran di atas, kiat dapat mengambil sedikit benang merah, keterlibatan kiai dalam politik ternyata belum mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, perselingkuhan kiai dengan politik sangat menguntungkan bagi penguatan akses dan jaringan serta pengembangan pesantren. Namun demikian, keterlibatannya juga membawa implikasi negatif bagi proses belajar mengajar di pesantren..

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Bagi peneliti, Indonesia adalah sebuah cerita tentang negeri yang kaya, baik secara natural maupun kultural. Kekayaan kebudayaan Indonesia salah satunya terwujud dalam banyaknya agama yang hidup dan berkembang di tanah air ini. Pluralitas agama di Indonesia adalah “takdir sejarah” yang tak terpungkiri, hingga belum ada peneliti yang sanggup menghitung jumlahnya. Yang pasti, pluralitas itu adalah kekayaan dan modal kebangsaan yang tiada tara, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Dalam bahasa peneliti, termasuk pluralitas orientasi dan ideologi politik juga merupakan bagian dari khazanah bangsa yang masih membutuhkan pengelolaan dengan baik.

Reformasi !!! kata itulah yang selalu menjadi sumber harapan bagi terciptanya tatanan bangsa dengan segala aspek kehidupannya. Termasuk aspek politik. Terbukanya sumbat politik ternyata mampu memberikan angin segar bagi mereka (politisi) yang sempat terpenjara ‘kebebasannya’ di era Orba, termasuk diantaranya adalah elit agama (kiai).

Menurut peneliti, diskursus tentang persinggungan kiai dengan politik merupakan kajian yang selalu menarik untuk didialogkan. Karena itulah, dalam penelitian yang secara khusus membicarakan tentang keterlibatan kiai dalam

politik di Kabupaten Batang, terutama efektivitas peran kepemimpinannya sebagai pimpinan partai politik, peneliti banyak menemukan data-data yang cukup penting (sekali lagi menurut peneliti) yang secara ringkas dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut :

1. Latar belakang keterlibatan kiai dalam pentas politik di Kabupaten Batang karena beberapa persoalan mendasar, antara lain adalah karena kedua partai tersebut adalah merupakan partai yang mempunyai nilai-nilai Islam (meskipun secara eksplisit tidak tertuang secara langsung, sebagai azas misalnya [PKB]). Alasan yang lain adalah karena adanya sinergisitas perjuangan antara Islam, NU dan organisasi politik. Kemudian politik lebih merupakan sebuah panggilan jira dan bentuk pengejawantahan konsep *din wa dulah* dalam setiap muslim. Yang tidak kalah menariknya adalah alasan yang barangkali sudah sangat akrab dalam telinga, yaitu alasan sebagai media memperjuangkan kepentingan rakyat.
2. Alasan mengapa lebih memilih kiai sebagai pimpinan partai politik. Sepanjang yang peneliti amati, ada dua aspek mendasar. *Pertama*, karena alasan historis bahwa lahirnya kedua partai tersebut dibidani oleh para kiai (ulama). *Kedua*, alasan politis, kiai merupakan tokoh sentral dalam masyarakat yang mempunyai kantong-kantong suara atau massa pendukung setia, yaitu para santri dan kalangan masyarakat tradisional. Di samping sisi

sejarah dan politis, alasan kenapa lebih memilih kiai karena ketinggian ilmu dan moralitasnya.

3. Dalam kaitannya dengan peran strategis kepemimpinan kiai sebagai pimpinan partai politik. Peneliti membagi dalam tiga aras, aras partai politik, aras pemerintahan dan aras masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas peran kepemimpinan kiai dalam tiga aras tersebut.

Dalam aras partai politik, secara politis keberadaan kiai lebih efektif dalam posisinya sebagai pembina dan penyejuk iklim partai. Kemudian juga cukup efektif bagi kebesaran partai, terutama dalam pendulangan suara (*foat getter*). Namun demikian, dalam persoalan manajemen partai, keberadaan kiai kurang begitu efektif. Sehingga tidak jarang berakibat pada lambatnya pengambilan kebijakan partai yang akan berimplikasi juga pada lambatnya terlaksananya program kerja.

Dalam aras pemerintahan, keberadaan kiai tidak ubahnya dalam posisi partai, lebih efektif sebagai pemantau pemerintah. Keberadaannya juga cukup efektif bagi proses pembejalaran politik masyarakat (*civic education*), meskipun tidak dalam kapasitas formal. Sebaliknya, keberadaan kiai tidak begitu efektif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam proses ini, mereka lebih cenderung pasif dan tarima jadi. Salah satu contoh yang peneliti dapat dari data di lapangan hadala dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sementara dalam aras masyarakat, peneliti melihat bahwa kiai lebih banyak memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Dalam urusan yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, jarana sekali disinggung.

4. Keterlibatan kiai dalam politik ternyata membawa implikasi, baik positif maupun negatif. Implikasi positif misalnya, bargaining position partai akan menjadi semakin besar dan lebih banyak mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari keberadaan kiai, apalagi sebagai pimpinan partai. Kiai juga banyak memberikan informasi tentang (pentingnya) politik dan perkembangannya, melalui media-media keagamaan. Namun demikian, keterlibatan kiai dalam politik ternyata belum mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Padahal kerja nyata itulah yang menjadi impian sebagian besar masyarakat.

Keterlibatannya juga cukup berdampak pada aktivitas-aktivitas keagamaan, terutama dalam proses pembelajaran di pesantren dan dakwah. Hal dikarenakan oleh banyaknya aktivitas politik kiai, terlebih ketika pesta politik tengah digelar. Bahkan yang cukup mencengangkan adalah menurunnya kharismatik dan krisis kepercayaan terhadap kiai dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

Berbagai temuan di atas cukup layak untuk dijadikan sebagai representasi dalam kaitannya dengan efektivitas peran kepemimpinan kiai dalam politik, terutama sebagai pimpinan partai.

Politik kiai memungkinkan akan mengarah pada terjadinya proses degradasi kultural dan nilai jika hanya dimanifestasikan dalam ruang politik praktis yang bersifat jangka pendek dan sesaat, serta dukung mendukung tokoh tertentu untuk merebut kepemimpinan partai politik atau suksesi politik semata.

Untuk itu, kiai hendaknya mempertimbangkan beberapa prasyarat penting sebelum memutuskan ‘berselingkuh’ dengan politik, apalagi ketika harus menduduki jabatan strategis atau pimpinan partai. *Pertama*, kompetensi personal yang meliputi integritas moral dan kemampuan memainkan politik secara santun. *Kedua*, kompetensi profesional yang berpijak pada kepentingan rakyat, bukan individu. Maka agar kepemimpinan kiai berjalan efektif, harus ada *second line* yang loyal dan pola koordinasi atau komunikasi aktif antara (kiai sebagai) pimpinan partai dengan jajaran di bawahnya.

Politik kiai sebaiknya diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang dan mengurus hal-hal fundamental menyangkut kepentingan dasar seperti kesejahteraan dan pendidikan, serta politik yang bersifat strategis menyangkut eksistensi dan kemandirian negara dalam pergaulan internasional. Dengan visi

dan orientasi seperti itu, kiai-kiai akan tetap menjadi figur sentral dan kharismatik di tengah masyarakat.

Kita masih menaruh harapan besar terhadap politik. Oleh karena itu, partai politik harus mampu menjadi media yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Kehadiran kiai dan tokoh agama dalam partai, tentunya harus mampu merubah paradigma politik yang sudah *kadung* bobrok dengan nuansa kepentingan (*private dan collective*) menjadi lebih bermoral. Moralitas inilah yang akan membawa warna baru dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh peneliti, harapan itu salah satunya tertuang dalam penulisan hasil penelitian yang sederhana ini.

Meski dilakukan hanya sebatas persyaratan akademik, peneliti mengakui dan sadar sepenuhnya, banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Saran, kritik dan “penelanjangan” adalah sebuah keniscayaan untuk perbaikan. Sekecil apapun, barangkali apa yang telah peneliti lakukan bisa bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang tengah ‘tidur nyenyak’ di atas ‘ranjang’ aspirasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Rais, Muhammad Dhiauddin, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul Sialmiyah*, Terj. Abdul Hayyi Al Kattani (*et al*),” Teori Politik Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001

Fatah, Rohadi Abd. *Islam and Good Governance : Ijtihad Politik ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Azis*, Tangerang : LeKDis, Cet. ke-1, 2007

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-5, 2005.

El-Affendi, Abdelwahab, *Who Need and Islamic State*, Terj. Amirudin ar-Rani, “Masyarakat Tak Bernegara : Ktitik Teori Politik Islam”, Jogjakarta : LKiS, Cet. ke-1, 1994.

L. Esposito, John (*ed*), *Islam and Development : Religion and Sociopolitical Change*, Terj. Wardah Hafidz, “Islam dan Perubahan Sosial di Negara Sedang Berkembang”, Jogjakarta : PLP2M, 1985.

Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Terj. Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam, “Pergolakan Pemikiran Politik Islam”, Jakarta : Beunebi Cipta, Cet. ke-1, 1987.

al-Maududi, Abul A’la, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Terj. Muhammad Al-Baqir, “Khilafah dan Kerajaan : Telaah Kritis Atas Sejarah Peradaban Islam”, Bandung : Mizan, Cet. ke-1, 1984.

Mughni, Syafiq A., *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Jakarta : Logos, Cet. ke-1, 1997

Mas’oed, Mochtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1994.

Iskandar, A. Muhaimin, *Menumbuhkan Kader Bangsa Investasi Politik Bersama Rakyat*, Jakarta : DPP PKB, 2000.

Syafei, Inu Kencana dkk., *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, Cet. ke-2, 2005.

Sabastian Salang, *Potret-Potret Partai Politik di Indonesia : Asasemen Terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Forum Politisi, 2007

Maliki, Zainuddin, *Agama Priyayi : Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*, Jogjakarta : Pustaka Marwa, Cet. ke-1, 2004.

Qodir, Zuly, *Islam Syariah Vis A Vis Negara : Teologi Gerakan Politik di Indonesia*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Baso, Ahmad, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung : Mizan, 2005.

Iskandar, A. Muhaimin, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, Jogjakarta : Klik R, Cet. Ke-1, 2006

A.S. Hikam, Muhammad , *Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 1999.

Adib (*et.all*), M. Kholidul, *Semangat Membangun Demokrasi: Jejak Politik Kiai dalam Pilkada Langsung Kabupaten Demak Tahun 2007*, Demak : GELORA, 2007.

Anasom (*ed*), *Membangun Negara Bermoral; Etika Bernegara dalam Naskah Klasik Jawa-Islam* Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002

Adib (*et all*), M. Kholidul, *Mengendalikan Syahwat Politik Kiai NU*, Semarang : Aneka Ilmu, 2004

Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : YA3, 1990

Soemitro, Rony Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Yudistira, 1990.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Rake Sarasin, Edisi. IV, 2000.

Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999
- As-Salus, Ali Ahmad, *Aqidah Al-Imamah 'Inda As-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, "Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'I", Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1997
- Asshidiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1995.
- Muthahhari, Murtadha, *Manusia dan Alam Semesta*, Jakarta : Lentera, 1991
- Tanjung, Akbar, *Kepemimpinan Poitik Yang Negarawan* , www.sekretariatnegara.com. 22/11/2008
- B.N Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Pakpahan, Mochtar, *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2006
- Salim, Abdul Mun'im, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan dan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2002
- *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan dalam Al Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Abidin, Ahmad Zainal, *Ilmu Politik Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Poerwdarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Ed, III, 2002
- Iskandar, A. Muhaimin, *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Social di Tingkat Basis: Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta : DPP PKB, 2000.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1998
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UIP, 1990.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Bila Kiai Diprtuhankan : Membedah Sikap Keberagamaan NU*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Haedari, Ahmad, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, Cet. ke-1, 1994

Hsubky, Badrudin, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. Ke-1, 1995

Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren Dalam Paratao Politik*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-1. 2007

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jilid 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Greetz, Clifford dalam M. Dawan Raharjo, *Intelektual Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa : Risalah Cendawan Muslim*, Bandung : Mizan, Cet. Ke-1, 1993

Fauzan, Ahmad, *Kepemimpinan Kiai*, Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisingo Semarang, 2004

Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Bandung : Pustaka Pelajar, Cet. ke-2, 1994.

Yulk. Gary, *Kepemimpinan dalam organisasi*, terj. Jusuf Udaya, Jakarta : Prehalindo, 1994

Al Mawardi, Gary, *Al-Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilayaatud-Diiniyyah*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani (*et all*), "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2000.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Yusuf, Slamet Effendi, dkk. *Dinamika Kaum Santri*, Jakarta: Rajawali, 1983¹

Ummatin, Khoiru, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Haidari, HM. Amin dan Abdullah Hanif (ed), *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas*, IRD Press, Cet. ke-1, 2004.

Mulkhan, Abdul Munir, *Menggugat Muhammadiyah*, Jogjakarta : Fajar Pustaka Baru, Cet. ke-1, 2000.

Batang Online, www.kabupatenbatang.go.id. Tanggal 2 Nopember 2008

Caswiyono Rusydi (ed all), *Pilkada Batang 2006 : Gerbang Menuju Demokratisasi Lokal*, diterbitkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang, 2006

Hasil wawancara dengan K.H. Nur Khozin, tanggal 10 Desember 2008

Hasil wawancara dengan K.H. Ahmad Soleh, tanggal 01 Januari 2009

Hasil wawancara dengan K. Muhtadi, Tanggal 13 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Fathurrahman, tanggal 21 Desember 2008

Hasil wawancara dengan H. A. Fauzi Fallas, tanggal 18 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Caswiyono Rusydi, tanggal 21 Desember 2008

Hasil wawancara dengan A. Munir Malik, tanggal 24 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Masruroh, tanggal 16 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Muhson, tanggal 23 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Suyono, tanggal 22 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Maghfiroh, tanggal 26 Desember 2008

Hasil wawancara dengan K. Abdul Kholik, tanggal 27 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Mahzum, tanggal 21 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Agus Setiawan, tanggal 15 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Muhammad Anas, tanggal 23 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Ahmad Khozin, tanggal 30 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Maghfur, tanggal 11 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Teguh Abadi, tanggal 27 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Amin, tanggal 27 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Sami Edi, tanggal 21 Desember 2008

Hasil wawancara dengan Rasi'an, tanggal 10 Januari 2009

- Hasil wawancara dengan Sobirin, tanggal 10 Januari 2009
- Hasil wawancara dengan Saiful Huda, tanggal 27 Desember 2008
- Hasil wawancara dengan Nasrudin, tanggal 10 Januari 2009
- Hasil wawancara dengan H. A. Taufiq, tanggal 3 Januari 2009
- Hasil wawancara dengan Priodigdo, tanggal 3 Januari 2009
- Hasil wawancara dengan Ngadiman, tanggal 27 Desember 2008
- Hasil wawancara dengan Umar Abdul Jabar, tanggal 4 Januari 2009
- Hasil wawancara dengan M. Tausirul Murod, tanggal 10 Desember 2008
- Hasil wawancara dengan Istiqomah, tanggal 15 Desember 2008
- Hasil wawancara dengan Khanif, tanggal 13 Desember 2008
- Hasil wawancara dengan Mufid, tanggal 4 Januari 2009
- P. Robinson, Stephen dan Mary Coulter, *Manajemen*, Jakarta: Indeks, Cet. ke-1, 2007
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar Di Jawa*, Jogjakarta, LKiS, 1999
- W.S. Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, 1983
- Sudjanto, Agus, *Psikologi Umum*, Jakarta: Angkasa Baru, 1989
- Singer, Kurt, *Membina Hasrat Belajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987
- B**

BIODATA CALON WISUDAWAN FEBRUARI 2009
(Formulir Pendaftaran Wisuda)

Data Pribadi :

Nama : **Muhamad Imron**
NIM : 2103240
Jurusan : Siyasah Jinayah
Tempat Tgl Lahir : Batang, 5 Januari 1984
Alamat Asal : Jl. Ponpes Asasul Huda Klawen Kel. Candigugur
RT. 09 RW. 04 Kec. Bawang
Kab. Batang Telp. 081548778553
Alamat Kost : Jl. Srikunoro II Kel. Kalibanteng Kulon
RT. 09 RW. 03 Kec. Semarang Barat
Kota Semarang Telp.
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERAN KEPEMIMPINAN KIAI SEBAGAI
PIMPINAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BATANG
JAWA TENGAH**
Lulus Munaqosah : Tgl. 27 Januari 2009
IPK : 3.38

Data Keluarga :

Nama Ayah : **Samsudin**
Pekerjaan ayah : Petani
Nama Ibu : Siti Amanah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Ponpes Asasul Huda Klawen Kel. Candigugur
RT. 09 RW. 04 Kec. Bawang
Kab. Batang Telp.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan **sebagai dasar pembuatan Ijazah dan Transkrip** serta data lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Wisuda.

Semarang, 4 Februari 2009

Calon Wisudawan,

(Muhamad Imron)